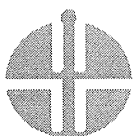


**Prosiding
Diskusi Panel
Globalisasi dalam Perspektif
Kajian Wilayah**



**Program
*In House Training***

**Pusat Penelitian Sumber Daya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PSDR-LIPI**

2010

© 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)

Katalog dalam Terbitan

Prosiding Diskusi Panel Globalisasi dalam Perspektif Kajian Ilmiah/Thee Kian Wie, Dewa Made Juniarta Sastrawan, Dave Lumenta, Dundin Zaenuddin, Siswanto, dan Fadjar Ibnu Thufail. – Jakarta: LIPI Press, 2010.

iv + 120 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-601-7

1. Globalisasi
2. Kajian ilmiah
3. Prosiding

508.3

Editor Bahasa : Halina Novicka
Kopieditor : Sarwendah Puspita Dewi
Pewajah Isi : Devi Riskianingrum
Desainer Sampul : Emil Hakim



Diterbitkan Oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021) 314 4591
E-mail: bmrliipi@centrin.net.id
lipipress@centrin.net.id
press@mail.lipi.go.id

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lantai I
Jalan Jenderal Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp. 021-5265152
Faks. 021-5265152

Pengantar

Buku ini merupakan kumpulan makalah dari diskusi panel yang berjudul “*Globalisasi dalam Perspektif Kajian Wilayah*” yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Program *In House Training* (IHT) pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR) LIPI. Diskusi panel ini diadakan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010. Seluruh makalah yang diterbitkan dalam prosiding ini telah terlebih dahulu diperbaiki oleh para pemakalah masing-masing. IHT sendiri merupakan salah satu program PSDR LIPI untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas peneliti di lingkungan Puslit PSDR.

Sebagai sebuah puslit yang fokus pada kajian kewilayahan, PSDR merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan peneliti, baik dalam mengkaji wilayah fokus penelitian maupun menyebarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Oleh karena itu, setelah beberapa tahun IHT fokus pada kemampuan berbahasa asing peneliti-peneliti PSDR maka pada tahun 2010 akhir ini IHT juga mengadakan diskusi panel terkait dengan pemahaman konsep dan pengembangan terkini dari kajian kewilayahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yekti Maunati, M.A. selaku ketua Pusat Penelitian PSDR periode 2000–2010 yang telah memberikan pemikiran dan pengarahan sehingga membantu terselenggaranya acara ini dengan baik. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh

pemakalah, yaitu Prof. Dr. THEE Kian Wie yang bersedia berbagi wawasan dengan menjadi *keynote speaker* pada acara ini serta kepada Dewa Made Juniarta Sastrawan, S.E., M.A. dari Kementerian Luar Negeri, Dr. Dave Lumenta dari Universitas Indonesia, Dr. Siswanto, M.Si., dan Dr. Fadjar Ibnu Thufail, M.A. dari PSDR LIPI. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar.

Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan ilmu secara garis besar ataupun saksama bagi para pembaca yang memiliki minat pada perkembangan kajian kewilayahan, terutama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan Eropa.

Jakarta, Desember 2010
Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Drs. Dundin Zaenuddin, M.A.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
<i>Term of Reference</i> Diskusi Panel	1
Jadwal Kegiatan Diskusi Panel	7
Globalisasi Ekonomi dalam Perspektif Kajian Wilayah	
Prof. Dr. THEE Kian Wie	9
Domestikasi Berita-Berita Internasional dan Hubungan Internasional	
Dewa Made Juniarta Sastrawan, S.E., M.A.	23
Changing Spaces and Border Regimes: A Central Borneo Trajectory of ‘ Globalisation’	
Dr. Dave Lumenta	39
Masyarakat Eropa dalam Merespons Globalisasi Diteropong dari Kajian Wilayah	
Dr. Siswanto, M.Si.	63

**Globalization of Culture:
Modern Society's Control over Nature and
Concerns about Ecological Dangers:
From Being Marginalized to Increasing
Mainstream Issue in South-East Asia?**

Drs. Dundin Zaenuddin, M.A.

91

**Multi-sited Research and Critical Comparison
in Area Studies**

Dr. Fadjar Ibnu Thufail, M.A.

117

TERM OF REFERENCE

DISKUSI PANEL

GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF KAJIAN WILAYAH

Devi Riskianingrum dan Kurnia Novianti

I. LATAR BELAKANG

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR) LIPI merupakan salah satu satuan kerja (satker) di kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan (IPSK) LIPI yang fokus pada pengembangan kajian kewilayahan (*area studies*). Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 2001 dan memiliki tiga wilayah kajian, yaitu Eropa, Asia Pasifik, dan Asia Tenggara. Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya para penelitiannya, lembaga ini mengadakan berbagai kegiatan penelitian dan diskusi yang terkait dengan pemahaman konsep dan perkembangan terkini dari kajian kewilayahan.

Kajian kewilayahan selama ini dipandang sebagai sebuah studi yang fokus pada kekhasan suatu wilayah. Oleh karena itu, kajian kewilayahan kaya akan informasi faktual yang detail atas suatu wilayah pada periode tertentu yang dikaji. Hal ini membuat kajian wilayah dianggap sebagai sebuah studi yang kurang memberikan perhatian yang lebih luas pada analisis kumulatif dan generalisasi, baik secara aplikasi

maupun secara teoretis.¹ Walaupun demikian, kajian wilayah juga merupakan sebuah konsep yang memiliki cakupan luas dalam subjek materi dan metode yang dipelajari, terutama sejak kajian wilayah menjadi kajian yang bersifat *multidisciplinary* dan/atau *interdisciplinary*.² Oleh karena itu, *area studies* dapat dipahami, baik sebagai substansi maupun sebagai pendekatan, tergantung dari sudut pandang peneliti yang mengkajinya.

Sementara itu, globalisasi menjelaskan sebuah proses terintergrasinya ekonomi, sosial, dan kultural regional melalui jaringan komunikasi dan perdagangan internasional. Proses globalisasi didorong oleh kombinasi antara kepentingan ekonomi, teknologi, sosiokultural, politik, dan faktor-faktor biologi. Lebih lanjut, konsep globalisasi juga merujuk kepada sirkulasi transnasional dari ide dan bahasa atau budaya pop melalui proses akulturasi budaya.³

Merujuk kepada kedua konsep tersebut maka kajian kewilayahan dan globalisasi adalah kajian yang saling bertolak belakang, yaitu studi kawasan fokus pada kekhasan suatu wilayah, sementara globalisasi melihat pada integralitas suatu kawasan atau wilayah. Akan tetapi, jika kita melihat lebih jauh,

¹ Mark Tessler et.al (ed.), *Area Studies and Social Science: Strategies for Understanding Middle East Politics*, (Indiana: Indiana University Press, 1999), pp. viii-ix.

² Quality Assurance Agency for Higher Education. 2002. *Area Studies*. Online www.qaa.ac.uk. Akses tanggal 16 Maret 2009.

³ Sheila L. Croucher. *Globalization and Belonging: The Politics of Identity in a Changing World*. Rowman & Littlefield. (2004). p.10

proses globalisasi juga terjadi di dalam suatu kajian kewilayahan, seperti pada fenomena semakin terintegralnya investasi Negara Cina ke dalam negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Melihat hal tersebut, PSDR LIPI sebagai lembaga yang fokus pada pengembangan studi kewilayahan merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut tema-tema globalisasi dalam perspektif studi kewilayahan. Hal ini menjadi penting untuk dipahami oleh para peneliti muda di lingkungan PSDR LIPI mengingat tema-tema penelitian yang dilakukan terkait dengan isu-isu kontemporer yang bersifat global dan menggunakan *area studies*, baik sebagai pendekatan maupun sebagai substansi. Oleh karena itu, penguasaan konsep-konsep tersebut dalam diskursus ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan menjadi sebuah keharusan.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka kajian mengenai tema-tema globalisasi yang dianalisis dengan menggunakan perspektif kajian kewilayahan menjadi perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu, PSDR LIPI sebagai sebuah institusi yang fokus pada kegiatan penelitian yang bersifat kajian kewilayahan dalam konteks global memfasilitasi sebuah kegiatan diskusi satu hari yang bersifat panel.

II. TUJUAN

Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Memberikan pemahaman kepada partisipan mengenai konsep globalisasi.

- Memberikan pemahaman kepada partisipan mengenai kajian wilayah sebagai suatu pendekatan dan sebagai substansi penelitian.
- Menelaah hubungan antara *area studies* dan globalisasi sebagai sebuah paradigma dalam mengkaji isu-isu sosial kemanusiaan pada sebuah wilayah.

III. TARGET

- Penguatan pemahaman konsep Globalisasi dan Kajian Wilayah
- Peningkatan pemahaman paradigma *area studies* dan globalisasi untuk digunakan dalam menganalisis isu-isu sosial pada sebuah wilayah.
- Membangun jaringan dengan lembaga atau institusi yang fokus pada studi kewilayahan.

IV. STRATEGI FORUM

Forum ini akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan mendatangkan narasumber yang memiliki perhatian pada studi kewilayahan dan globalisasi. Forum ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yang akan membahas kajian wilayah dan globalisasi sebagai sebuah konsep serta pendekatan dalam menganalisis isu-isu sosial kemanusiaan.

Sesi Kedua akan membahas mengenai hubungan globalisasi dan kajian wilayah dalam subjek penelitian-penelitian kewilayahan.

V. NARASUMBER

Kegiatan ini akan mendatangkan beberapa ahli kajian wilayah yang telah berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial-kemasyarakatan dan budaya di Indonesia, yaitu:

- a) Dr. Thee Kian Wie
- b) Dewa Made Juniarta Sastrawan, S.E., M.A.
- c) Dr. Dr. Dave Lumenta
- d) Drs. Dundin Zaenuddin, M.A.
- e) Dr. Siswanto, M.Si.
- f) Dr. Fadjar Ibnu Thufail, M.A.

VI. WAKTU DAN TEMPAT

Kamis, 5 Agustus 2010

Gedung Widya Graha LIPI Lantai V

Jln. Gatot Subroto Kav. 10

Jakarta Selatan 12710

Telp. 021-5251542 ext. 606

Faks. 021-5265152

VII. PESERTA

Peserta diskusi panel adalah seluruh peneliti pada Puslit PSDR LIPI dan undangan, baik dari lingkungan IPSK LIPI maupun dari Universitas di Jakarta.

JADWAL KEGIATAN DISKUSI PANEL
“GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF KAJIAN
WILAYAH”
(Tentative)

09.00–09.30	Registrasi
09.30–09.45	Pembukaan/ <i>Opening Remark</i> oleh Dr. Yekti Maunati, M.A.
09.45–10.00	<i>Keynote Speech</i> oleh Dr. Thee Kian Wie
Sesi I	
10.30–11.00	Presentasi oleh Dewa Made Juniarta Sastrawan, S.E., M.A. Judul makalah: Domestikasi Berita-Berita Internasional dan Hubungan Internasional
11.00–11.30	Presentasi oleh Dr. Dave Lumenta Judul makalah: Ruang& Formasi Sosial: Pengalaman Studi Etnografi Tanpa Batas di Borneo
11.30–12.30	Diskusi terbuka

Moderator Sesi I	Ulil Amri, S.Sos.
12.30–13.30	Istirahat
Sesi II	
13.30–14.00	Presentasi oleh Dr. Siswanto, M.Si. Judul makalah: Masyarakat Eropa dalam Merespons Globalisasi Diteropong dari Kajian Wilayah
14.00–14.30	Presentasi oleh Dr. Fadjar Ibnu Thufail, M.A. Judul makalah: <i>Multi-sited Research and Critical Comparison in Area Studies</i>
14.30–15.30	Presentasi oleh Drs. Dundin Zaenuddin, M.A. Judul makalah: <i>Globalization of Culture: Modern Society's Control over Nature and Concerns about Ecological Dangers: From Being Marginalized to Increasing Mainstream Issue in South-East Asia?</i>
15.30–16.30	Diskusi terbuka
Moderator Sesi II	Amin Mudzakkir, S.S.
16.30–16.40	Penutupan/ <i>Closing Remark</i> oleh Dr. Siswanto, M.Si

GLOBALISASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF KAJIAN WILAYAH⁴

Oleh:

THEE Kian Wie

Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Arti Globalisasi Ekonomi

Ditinjau dari segi ekonomi, globalisasi adalah integrasi ekonomi antara berbagai negara yang memperluas dan memperdalam hubungan ekonomi yang saling mengaitkan ekonomi dari negara-negara tersebut (World Bank, 2008). Globalisasi ekonomi meliputi berbagai aspek hubungan ekonomi antarnegara, yaitu perdagangan barang-barang dan jasa-jasa, transaksi finansial, arus turisme antarnegara, serta migrasi manusia dan tenaga kerja antarnegara, antarkawasan, dan antarbenua, serta transportasi dan komunikasi antarnegara, antarkawasan, dan antarbenua yang makin banyak.

⁴ Prasaran yang disampaikan pada Diskusi Panel tentang Globalisasi Dalam Perspektif Kajian Wilayah yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI) pada hari Kamis, 5 Agustus 2010 pukul 09.00 WIB di Widya Graha, lt. 5.

Integrasi ekonomi antarnegara, antarkawasan, dan antarbenua bukan proses yang sederhana atau pasti karena integrasi ekonomi yang makin kuat dilandasi oleh hubungan politik dan kebudayaan antarnegara. Meskipun letak geografi yang jauh antarnegara, antarkawasan, dan antarbenua di masa lampau merupakan rintangan yang besar untuk menjalin hubungan ekonomi, namun berkat perkembangan komunikasi, transportasi, dan informasi, khususnya hubungan melalui internet yang amat pesat dan berkat perkembangan teknologi modern maka letak geografi yang jauh kini bukan lagi merupakan rintangan yang besar.

Sejak awal 1990-an terjadi perluasan ekonomi global dan hubungan ekonomi antarnegara yang amat besar. Misalnya, perdagangan antarnegara di kawasan Asia-Pasifik (termasuk Indonesia), telah meningkat dari 47 persen pada 1990 menjadi 87 persen pada 2006. Di samping itu, selama kurun waktu yang sama, arus modal swasta dari mancanegara yang masuk ke kawasan Asia-Pasifik telah meningkat menjadi 11 persen dari 7 persen Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan semua negara Asia-Pasifik. Perkembangan ekonomi yang dinamis dari negara-negara kawasan Asia-Pasifik kentara sekali dari kenaikan pangsa mereka dalam jumlah total ekspor dunia dari yang hanya 3.5 persen pada 1980 menjadi 10.8 persen pada 2006 (World Bank, 2008).

Dengan berlanjutnya proses integrasi ekonomi global dan regional, pangsa ekonomi dari negara-negara besar yang sedang muncul ke atas dengan pesat (*emerging economies*),

seperti Brasil, Rusia, India, dan China yang sering disebut BRIC (Brasil, Rusia, India, China) dalam ekonomi global akan bertambah besar. Hal ini terjadi karena transpor udara dan laut yang makin cepat dan efisien memungkinkan transpor barang-barang yang lebih cepat dari negara-negara produsen ke negara-negara konsumen. Transpor udara dan laut yang lebih cepat dan efisien adalah karena kemajuan dan lingkungan peraturan (*regulatory environment*) yang lebih kondusif sehingga berhasil mengurangi biaya komunikasi global, mempercepat penyebaran informasi melalui internet serta memperbaiki manajemen kegiatan ekonomi. Namun, integrasi ekonomi global dan regional (misalnya di antara negara-negara Asia Timur) bukan saja didorong oleh kemajuan teknologi, transpor, dan komunikasi yang pesat, tetapi juga oleh kebijakan kondusif yang ditempuh masing-masing negara. Artinya, kebijakan yang tidak menghambat atau mempersulit integrasi ekonomi global atau regional.

Pada dasarnya semua negara berkembang, termasuk Indonesia, mempunyai potensi untuk menikmati keuntungan dari globalisasi ekonomi yang terintegrasi. Namun, tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang adalah bahwa globalisasi ekonomi ini bukan saja bisa menguntungkan, tetapi juga bisa merugikan mereka. Untuk mewujudkan keuntungan yang dapat diperoleh dari globalisasi ekonomi, khususnya dalam menghadapi persaingan yang makin tajam di pasar dunia, negara-negara berkembang perlu mengembangkan kemampuan mereka untuk menyerap dan menguasai teknologi dan metode manajemen baru, menggunakan modal secara

produktif dan seefisien mungkin serta memperbaiki dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja mereka. Dengan demikian, mereka dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan yang lebih adil.

Selama tahun-tahun terakhir era Presiden Sukarno, Indonesia makin melepaskan hubungannya dengan ekonomi global, khususnya dengan negara-negara kapitalis Barat. Malahan pada awal 1965 Indonesia keluar dari keanggotannya di PBB, IMF, dan Bank Dunia, dan menyatakan tidak mau menerima lagi bantuan dari Amerika Serikat, bahkan Presiden Sukarno menyatakan kepada AS, *'go to hell with your aid!'*.

Sewaktu Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang baru, beliau sejak awal menyadari kebijakan yang anti-Barat dan antikapitalis tidak menguntungkan Indonesia karena ekonomi Indonesia yang terpuruk perlu dipulihkan kembali dan kemudian perlu dibangun kembali (Elson, 2001). Oleh karena itu, sejak awal Orde Baru Suharto memutuskan untuk mereintegrasikan Indonesia dengan ekonomi dunia, khususnya dengan negara-negara kapitalis Barat dan Jepang (Hollinger, 1996). Malahan reintegrasi ekonomi Indonesia dengan ekonomi dunia menjadi salah satu landasan pokok kebijakan ekonomi Orde Baru (Thee, 2002).

Dalam rangka reintegrasi ekonomi Indonesia dengan ekonomi global, Pemerintah Orde Baru secara bertahap mulai mengurangi berbagai rintangan atas perdagangan dalam negeri,

regional, dan internasional dan atas investasi swasta domestik dan asing langsung (*foreign direct investment*). Hal ini tercermin dari keluarnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 1967. Akibat kebijakan ‘pintu terbuka’ (*open door policy*) bagi investasi asing langsung (*foreign direct investment, FDI*) maka arus investasi asing langsung meningkat pesat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, Pemerintah Indonesia pada 2007 telah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang baru yang menjamin perlakuan yang sama antara investor asing dan investor domestik (*national treatment*). Berkat kebijakan investasi asing langsung yang lebih kondusif, akhir-akhir ini investasi asing mulai meningkat dengan pesat.

Reintegrasi dengan ekonomi dunia, khususnya dengan negara-negara kapitalis Barat dan Jepang, juga memungkinkan Pemerintah Orde Baru untuk menjadwalkan kembali pembayaran hutang luar negerinya kepada negara-negara Barat dan Jepang melalui pertemuan ‘Paris Club’ yang diselenggarakan di Paris pada September 1966. Pemerintah Indonesia pada 1971 juga berhasil menjadwalkan kembali hutang luar negerinya yang lebih besar kepada Uni Soviet dan negara-negara sosialis Eropa Timur.

Setelah masalah penjadwalan kembali pembayaran hutang luar negeri Indonesia telah disepakati dengan negara-negara kreditor, bantuan luar negeri untuk stabilisasi dan

rehabilitasi ekonomi Indonesia dari negara-negara Barat dan Jepang mulai mengalir ke Indonesia dalam jumlah yang makin banyak. Negara-negara donor ini bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia kemudian membentuk konsorsium bantuan luar negeri, yaitu Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) yang sampai 1992 diketuai oleh Negeri Belanda. Sejak 1992 sampai 2007 Bank Dunia mengetuai konsorsium negara-negara donor yang disebut Consultative Group on Indonesia (CGI). Pada 2007 setelah berkonsultasi dengan Bank Dunia, Pemerintah Indonesia membubarkan CGI. Setelah pembubaran CGI, Pemerintah Indonesia bernegosiasi langsung dengan masing-masing badan dan negara donor tentang bantuan yang masih diperlukan, sedangkan dengan Bank Dunia Pemerintah Indonesia dapat bertukar-pikiran tentang berbagai masalah dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Pada 1993/1994 dan 1978/1979 Indonesia mengalami *boom* minyak bumi akibat kenaikan pesat harga minyak bumi di pasar minyak dunia. Sayang sekali sebagian dari *boom* minyak bumi pertama (1973/1974) terpaksa digunakan Pemerintah Indonesia untuk membayar utang Pertamina yang besar karena salah urus dalam pengelolaan Pertamina. Meskipun demikian, sebagian besar penghasilan dari *boom* minyak bumi digunakan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk pembangunan daerah melalui program Instruksi Presiden (Inpres), pembangunan sosial (khususnya pendidikan dan

kesehatan), pembangunan prasarana fisik dan industri dasar berskala besar yang padat modal.

Akan tetapi, pada 1982 era *boom* minyak bumi berakhir sewaktu harga minyak bumi di pasar dunia merosot tajam. Menghadapi penghasilan ekspor dan penerimaan pemerintah yang sangat merosot, Pemerintah Indonesia terpaksa beralih dari kebijakan industrialisasi substitusi impor ke kebijakan promosi ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan ekspor non-migas, khususnya ekspor hasil-hasil industri manufaktur. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Indonesia sejak 1983 sampai pertengahan 1990-an mengeluarkan serangkaian paket deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat bagi sektor swasta, termasuk swasta asing.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga mengintrodusir serangkaian pembaruan dalam kebijakan niaganya (*trade regime*) untuk mengurangi bias anti-ekspor (*anti-export bias*) dalam kebijakan niaga ini. Berkat kebijakan deregulasi dan kebijakan niaganya yang lebih kondusif, sejak 1987 Indonesia mulai mengekspor hasil-hasil industri dalam jumlah dan nilai yang makin tinggi sehingga pada awal 1990-an nilai ekspor hasil-hasil industri manufaktur telah melebihi 50 persen dari ekspor total Indonesia. Pertumbuhan ekspor hasil-hasil industri yang pesat mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat. Tidak mengherankan bahwa pada 1993 Bank Dunia dalam laporannya yang terkenal, *The East Asian Miracle—Economic*

Growth and Public Policy, menggolongkan Indonesia dalam jajaran delapan ekonomi Asia Timur yang berkinerja tinggi (*high-performing Asian economies, HPAEs*) di samping Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Thailand (World Bank, 1993).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat tiba-tiba terhenti pada 1997 sewaktu Indonesia melalui proses penularan (*contagion*) dari kepanikan yang dihindangi para investor dan kreditor asing di Thailand yang kemudian menjalar ke Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Akibat krisis finansial Asia (Asian Financial Crisis) ini, ekonomi Indonesia pada 1998 mengalami kontraksi tajam sebanyak -13.1 persen, yang merupakan kontraksi tertajam di kawasan Asia Timur. Krisis finansial yang tajam ini jelas menunjukkan segi dan dampak negatif dari globalisasi ekonomi.

Berkat kebijakan makroekonomi yang sehat (*sound*) dan restrukturasi sistem perbankan, ekonomi Indonesia secara lambat laun mulai pulih lagi sehingga ekonomi Indonesia mulai bertumbuh dengan lebih pesat dan pada 2007 mencapai pertumbuhan setinggi 6.3 persen. Akan tetapi, pada 2008 Indonesia untuk kedua kalinya terkena dampak negatif dari krisis finansial, yaitu Krisis Finansial Global (Global Financial Crisis, GFC) yang kali ini bersumber di Amerika Serikat yang dipicu oleh kegagalan *subprime mortgage* (pinjaman hipotek di bawah standar yang diberikan kepada calon pembeli rumah yang sebenarnya tidak layak mendapat kredit untuk pembelian rumah karena penghasilan mereka tidak memadai untuk

membayar kembali pinjaman hipotek ini). Oleh karena itu, ekonomi Indonesia pada 2008 turun sampai 6.0 persen dan pada 2009 menjadi 4.5 persen. Namun, dengan pulihnya ekonomi Indonesia pada 2010, ekonomi Indonesia pada 2010 diperkirakan bertumbuh 5.9 persen dan pada 2011 meningkat lagi sampai 6.2 persen (World Bank, 2010). Pemulihan ekonomi Indonesia disebabkan kebijakan stimulus fiskal yang cepat dari Pemerintah Indonesia, khususnya oleh Menteri Keuangan R.I., berupa pengurangan pajak (*tax cuts*) serta penambahan pengeluaran pemerintah untuk program-program intinya (World Bank, 2009).

Kedua krisis finansial di atas menunjukkan bahwa di samping dampak yang baik dan menguntungkan dari globalisasi ekonomi, terdapat juga dampak buruk yang mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperburuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, baik negara-negara maju maupun ekonomi-ekonomi yang sedang bangkit (*emerging economies*), berusaha sekeras-kerasnya untuk menanggulangi dampak buruk dari Krisis Finansial Global (GFC) dengan berbagai paket stimulus fiskal untuk menggerakkan kembali ekonomi mereka.

Pada Konferensi G-20 dari ekonomi-ekonomi utama di dunia (*major economies*) yang terakhir di Toronto, Kanada, pada bulan Juni 2010 di mana Indonesia juga ikut serta sebagai salah satu negara di antara 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, ditegaskan lagi kesepakatan yang telah dicapai pada Konferensi G-20 sebelumnya di London, yaitu bahwa

pengaturan yang lebih ketat atas kegiatan sektor finansial perlu dilakukan. Kesepakatan ini terutama ditujukan pada sektor finansial Amerika Serikat dan Inggris yang ternyata melakukan berbagai transaksi dan spekulasi finansial yang penuh risiko sehingga menjerumuskan seluruh ekonomi dunia dalam krisis ekonomi yang serius.

Globalisasi Ekonomi dalam Perspektif Kajian Wilayah

Di atas telah dikemukakan bahwa globalisasi ekonomi dalam arti ekonomi bukan saja meliputi integrasi ekonomi antar berbagai negara di dunia, tetapi juga integrasi ekonomi antarnegara di kawasan tertentu atau antarkawasan yang berlokasi berdekatan satu sama lain. Misalnya, dalam lingkungan ASEAN telah dibentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang bertujuan untuk mendorong perdagangan antarnegara ASEAN dengan menghilangkan hambatan perdagangan secara bertahap. Dengan demikian, masing-masing negara-negara anggota ASEAN bisa meraih keuntungan yang statis dan dinamis dari perdagangan antarmereka (static and dynamic gains from trade) berdasarkan spesialisasi menurut keunggulan komparatif statis dan dinamis mereka.

Pertumbuhan ekonomi yang amat pesat di negara-negara Asia Timur Laut (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan akhir-akhir China) juga berdampak positif pada negara-negara anggota Asia Tenggara (ASEAN) karena terjadi peningkatan yang pesat dalam perdagangan antarnegara

dari kedua kawasan ini. Di samping itu, negara-negara dari kawasan Asia Timur Laut sejak akhir 1980-an juga telah muncul sebagai sumber investasi asing langsung terbesar di kawasan Asia Tenggara (Thee, 2010).

Suatu aspek lain yang menarik dari integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur Raya adalah apa yang dinamakan fragmentasi produk (*product fragmentation*), yaitu penyebaran produksi dan perakitan komponen mobil (*auto parts*), komponen elektronika, dan komponen komputer serta komponen-komponen dari barang-barang lain (kamera, pesawat TV, barang optik, perlengkapan musik, arloji, mesin jahit, barang-barang kimia dan farmasi, garmen) di berbagai negara dalam proses produksi yang terintegrasi secara vertikal. Fragmentasi produk ini dipicu oleh perluasan yang amat pesat dari kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional (*transnational corporations, TNCs*) dalam ekonomi global selama tiga dasawarsa mutakhir (Athukorala, 2007). Meskipun bagian terbesar dari perdagangan komponen dilakukan antara negara-negara maju, namun pangsa negara-negara berkembang Asia Timur (terkecuali Jepang) yang terlibat dalam perdagangan komponen telah meningkat pesat dari 14.1 persen pada 1992 sampai 27.3 persen pada 2003 (Athukorala, 2007).

Beberapa aspek dari integrasi ekonomi regional di atas menunjukkan dengan jelas bahwa integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur (Asia Timur Laut dan Asia Tenggara) selama beberapa dasawarsa mutakhir telah berlangsung dengan pesat dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, ditinjau dari

segi kajian wilayah, berbagai aspek dari integrasi ekonomi regional di Asia Timur patut dikaji secara lebih mendalam.

Jakarta, 20 Juli 2010.

Daftar Pustaka

- Athukorala, Premachandra. 2007. *Multinational Enterprises in Asian Development*. UK and Northampton USA: Edward Elgar, Cheltenham, MA.
- Dick, Howard, J.Th. Lindblad, Thee Kian Wie dkk. 2002. *The Emergence of a National Economy—An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. Sydney&Leiden: Allen and Unwin & KITLV Press.
- Elson, Robert E. 2001. *Suharto—A Political Biography*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hollinger, William C. 1996. *Economic Policy Under President Soeharto: Indonesia's Twenty-Five Year Record*. Background Paper No. 2. Washington. D.C: The United States-Indonesia Society.
- Thee, Kian Wie. 2002. "The Soeharto Era and After: Stability, Development and Crisis, 1966–2000". in: Dick, *et al.* 2002, hlm. 194–243.
- Thee, Kian Wie. 2010. "Foreign Direct Investment from Northeast Asia to Southeast Asia". *The Indonesian Quarterly*, June 2010. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

World Bank. 1993. *The East Asian Miracle—Economic Growth and Public Policy*. New York: Oxford University Press.

World Bank. 2008. *World Development Indicators April 2008*. Washington D.C.: Development Data Group.

World Bank. 2009. *Indonesia Economic Quarterly—Clearing Skies*. Jakarta.

World Bank. 2010. *Indonesia Economic Quarterly—Continuity amidst volatility*. Jakarta.

Domestikasi Berita-Berita Internasional dan Hubungan Internasional

oleh:

Dewa Made Juniarta Sastrawan

Direktur Eropa Barat Kementerian Luar Negeri RI

News makes certain things explicit while leaving other things implicit; it is inevitably guided by notions of what is unexpected, extraordinary and abnormal. Small forms of cultural deviance may lead to major moral panics. Since the largest and richest transcontinental media organizations originate from the largest and richest Western countries, their selection and interpretation is primarily guided by the preoccupations of those countries and audiences. Furthermore, their commercial orientation plays a certain role as well.

(Jaap van Ginneken, 1998)

Pendahuluan

Makalah singkat ini merupakan catatan penulis sebagai diplomat yang mengamati bagaimana berita-berita internasional memberikan pengetahuan mengenai masalah-masalah internasional bagi bangsa Indonesia dan kenapa masih

ada citra buruk tentang Indonesia di luar negeri meskipun Indonesia telah menjadi negara yang demokratis. Pandangan serta pendapat penulis dalam makalah ini sepenuhnya adalah pandangan pribadi penulis.

Tulisan ini membahas bagaimana berita-berita internasional disajikan di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap para pemirsa, pembaca, dan pendengar (*audiences*) dan sebaliknya bagaimana berita-berita Indonesia diterjemahkan dan disajikan oleh kantor-kantor berita internasional agar dapat dinikmati oleh *audiences* di mancanegara.

Interaksi antara Global dan Lokal

Giddens (1990) dan Anabelle Sereberby-Mohammadi (2001) mendefinisikan globalisasi sebagai '*the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa*'. Dalam hal ini tercipta adanya *time space distanciation*, di mana terjadi hubungan yang rumit antar- '*local involvement*' (*circumstances of co-presence*) dan terjadinya *interaction across distance* (*connection of presence and absence*).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Marty Natalegawa, senantiasa menegaskan bahwa geopolitik global telah berubah menjadi multipolar dengan berbagai pusat pengaruh dan kekuatan sehingga masyarakat internasional saat ini sedang menghadapi *challenges that are multifaceted in form, simultaneous in time*

and transboundary in nature. Dengan lain perkataan saat ini berbagai tantangan bersifat multidimensional tanpa mengenal batas negara dan waktu. Ancaman mutakhir kepada dunia saat ini bersifat *non-traditional* dengan dampak yang luar biasa. Perubahan iklim, krisis pangan, energi, air, dan keuangan serta bahaya *pandemic global* bisa disebutkan di antaranya (www.deplu.go.id).

Terkait dengan kedua hal di atas, media memainkan peranan yang sangat *crucial*, baik dalam proses dan dinamika interaksi antara globalisasi dan lokalisasi (*globalizations and localization*) maupun dalam dinamika hubungan internasional dalam menghadapi tantangan di atas. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peranan media adalah menjembatani informasi dari peristiwa yang terjadi di satu tempat untuk diketahui di tempat lainnya.

Proses Domestikasi Berita Internasional

Setiap hari media massa di Indonesia menyajikan berita-berita internasional yang terjadi di negara-negara lainnya. *Audiences* Indonesia memperoleh berita-berita internasional yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Umumnya media massa Indonesia memperoleh berita-berita internasional tersebut dari kantor-kantor berita internasional (*international news wholesalers/agencies*) karena perusahaan media massa Indonesia memiliki keterbatasan untuk mengumpulkan sendiri berita-berita internasional tersebut.

Secara historis, agen-agen berita internasional inilah yang mengumpulkan dan menyebarluaskan berita-berita kepada media-media massa lainnya dan menurut Anabelle Sereberby-Mohammadi (2001), ada empat agen berita internasional, yakni AP/Amerika Serikat (AS), AFP/Prancis, Reuters/Inggris, dan UPI/AS (yang terakhir ini kemudian dijual ke *the Washington Post*), yang tidak saja mengontrol arus berita internasional, tetapi juga menetapkan prioritas berita-berita yang dialirkan ke negara-negara dunia ketiga (*Third world countries*) yang dikenal juga dengan sebutan negara-negara berkembang.

Pada praktiknya, para pekerja pers memberikan pengaruh (*to influx*) terhadap berita internasional dan *domestic audiences*. Mereka mengartikulasikan pengetahuan mereka mengenai berita-berita asing dan kepentingan *domestic audiences* dengan jalan membentuk (*constructing*) rangkaian pengertian (*chain of meaning*). Dengan kata lain, untuk membuat berita-berita asing terkait (*relevant*) dan dapat dimengerti oleh *domestic audiences*, para pekerja pers melakukan *re-frame/re-present/re-construct* berita-berita asing untuk menjadikannya sebuah *cultural framework* yang dapat dimengerti oleh *domestic audiences* di setiap bangsa. Hal ini dikenal dengan proses domestikasi berita-berita internasional (Clausen *et al.*, 2004, 1996; Gurevitch, 1991).

Dapat dikatakan bahwa domestikasi berita-berita internasional memiliki proses ganda, yaitu mengartikan materi berita-berita internasional yang diterima (*decoding*) dan *re-framing/re-presenting/re-constructing* materi-materi tersebut

agar dapat dimengerti oleh *target audiences* (*encoding*). Dalam proses penerjemahan dan penyajian kembali berita-berita asing tersebut, pengertian asli (*original meaning*) dari bahan-bahan berita asing akan mengalami perubahan. Dengan lain perkataan, berita-berita asing yang muncul kembali dalam media masa domestik telah *culturally translated* (Roeh and Dahlegren, 1991, cited in Cohen *et al.*, 1996).

Sementara itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan terjadinya difusi global dari kejadian-kejadian lokal serta mengakibatkan meningkatnya kesadaran tentang kebudayaan lain. Dalam hal ini berita-berita internasional yang dibentuk oleh budaya tertentu dapat diterjemahkan berdasarkan budaya bangsa yang mengartikulasikannya kembali untuk *audience* lainnya.

Sebagaimana disampaikan di atas, agen/kantor berita utama dunia yang berkantor pusat di Eropa dan Amerika mendominasi penyebaran dan pengumpulan berita internasional. Pada dasarnya pengumpulan dan penyebaran berita yang dilakukan oleh perusahaan kantor berita Eropa dan Amerika tersebut adalah untuk memuaskan pasar/*audience* domestiknya sehingga berita-berita global yang disajikan akan cenderung menggambarkan kepentingan Eropa dan Amerika, seperti banyak kita lihat dalam berita-berita mengenai hubungan internasional, kepentingan politik dan ekonomi, kebudayaan dan lainnya.

Lebih jauh, artikulasi antara berita internasional dan agenda nasional juga terkait dengan hubungan politik dan diplomasi. Seperti yang dikemukakan oleh van Ginneken

(1998) bahwa media biasanya beroperasi sebagai “*secondary definers*” yang menerjemahkan kerangka pemikiran yang dihasilkan oleh “*primary definers*” yang dalam hal ini adalah para pejabat pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa laporan media mengenai kejadian tertentu tidak akan terlepas dari kepentingan negara asal sumber beritanya. Situasi ini mengakibatkan hubungan internasional dan diplomasi menjadi sumber utama berita-berita internasional.

Dalam menyajikan berita terjadi ketidakseimbangan struktural (*structural imbalances*). Karena media massa berita harus berbicara mengenai berita internasional dari sudut pandang Eropa maka banyak bagian dunia yang tidak dapat direpresentasikan secara utuh (*not authentically represented*). Oleh karena itu, “peta dunia” yang digambarkan oleh Kantor Berita Eropa-Amerika dan media sangat mungkin tidak tepat (*misconstructed*). Hal ini terjadi karena media pemberitaan di negara-negara berkembang dan dunia ketiga juga sangat tergantung pada Kantor Berita Amerika Eropa sebagai sumber berita sehingga pandangan pekerja media di negara berkembang pun tanpa disadari mengikuti cara Eropa dan Amerika dalam memandang dunia. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh van Ginneken (1998) bahwa Kantor Berita Eropa-Amerika memiliki posisi “*a quasi monopoly*” dalam penyediaan *prime definition of breaking news in the world periphery*”.

Hal ini terlihat sebagaimana yang terjadi pada peliputan berita mengenai Islam dan terorisme yang sangat jelas menggambarkan hal ini, di mana sejak terjadinya peristiwa

9/11 pada tahun 2001, agenda pembicaraan masyarakat internasional mengenai terorisme ditentukan oleh kekuatan-kekuatan Barat (*Western powers*). Sejak saat itu, isu terorisme dan yang terkait menjadi agenda pembahasan di berbagai forum global dan regional, seperti pada pertemuan-pertemuan PBB dan G8. Dalam forum-forum tersebut, Amerika, Inggris, dan Prancis yang dalam industri media dikenal sebagai penyalur utama berita internasional menjadi anggota pada forum tersebut dan terlihat agenda negara-negara tersebutlah yang menjadi fokus berita-berita internasional. Dalam sajian media Barat, kata terorisme sering dikaitkan dengan '*Islamic fundamentalists*' atau '*extremists*' yang melakukan serangan teror atau menentang negara-negara Barat. Bahkan media Barat telah membangun citra yang permanen tentang Islam yang diidentifikasi dengan *religious fundamentalists and extremists* atau konotasi negatif lainnya seperti yang terkait dengan radikalisme (Said, 1997).

Demokrasi, Islam, dan Pembangunan di Indonesia

Menghadapi fenomena tersebut, Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2002 telah melakukan kampanye pencitraan bahwa Indonesia dengan penduduk mayoritas pemeluk agama Islam adalah Muslim moderat dan Indonesia bukan Negara Islam. Diplomasi Indonesia juga difokuskan untuk mengampanyekan bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang beragam suku bangsa dan agama (*pluralistic society*) yang telah hidup berdampingan secara damai selama ratusan tahun karena dalam masyarakat Indonesia tertanam disiplin

kehidupan yang mengutamakan *dialogue* (musyawarah) untuk mencapai saling pengertian (mufakat). Untuk ini, Indonesia sejak saat itu senantiasa memberikan pengertian kepada masyarakat Barat (internasional) tentang pentingnya *interfaith* dan *intercultural dialogue* dalam masyarakat yang majemuk. Indonesia juga mengampanyekan bahwa bangsa Indonesia yang didominasi oleh penduduk pemeluk agama Islam telah berhasil menerapkan demokrasi dengan baik seperti negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Di samping itu, Indonesia juga telah berhasil membangun ekonomi yang relatif lebih baik dari negara-negara lainnya sehingga diterima menjadi anggota G-20 bersama-sama dengan negara-negara maju, seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Jerman.

Saat ini setelah sepuluh tahun sejak reformasi Indonesia dilaksanakan, kepada negara-negara maju Indonesia senantiasa menyatakan bahwa di Indonesia, demokrasi, Islam, dan pembangunan dapat dijalankan secara berdampingan dengan harmonis. Pada awalnya kampanye Indonesia ini sangat sulit diterima oleh masyarakat internasional (negara-negara Barat), namun setelah Indonesia dapat menunjukkan bahwa Indonesia bersungguh-sungguh melaksanakan demokratisasi dan berhasil memberantas terorisme dan menangkap serta mengadili pelaku terorisme berdasarkan hukum, secara perlahan negara-negara Baat tersebut dapat diyakinkan bahwa dengan penerapan demokrasi, Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim dapat memberantas terorisme berdasarkan hukum dan tata cara yang berlaku secara internasional. *Secretary of State of the US*, Hillary Clinton, ketika berkunjung ke Jakarta pada bulan

Februari 2009 menyatakan bahwa masyarakat internasional hendaknya belajar dari Indonesia untuk menerapkan bagaimana demokrasi, Islam, dan pembangunan dapat dijalankan secara harmonis (www.deplu.go.id).

Nilai Berita Internasional

Untuk memahami fenomena pemberitaan internasional tersebut, penulis mencoba melihat bagaimana suatu laporan jurnalis memiliki nilai berita (*newsworthy*). Menurut John Fisk (1990) dan Jaap van Ginneken (1998), dalam mengkaji *newsworthines*, keduanya merujuk pada John Galtung dan Mari Holmboe Ruge yang pada awal tahun 1960-an mengadakan penelitian tentang “*structure of foreign news*”. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai *content analysis* media cetak di ibu kota negara kecil Norwegia (*First World periphery*) yang memberitakan peristiwa terjadinya krisis di negara-negara kecil seperti Congo (Zaire), Cuba, dan Cyprus (*Third World periphery*). Ditegaskan bahwa berita-berita yang diberitakan umumnya memiliki nilai-nilai utama (*dominant news values*) sebagai berikut: (i) menyangkut kalangan elit (*it concerns elite personalities*); (ii) sesuatu yang negatif (*it is negative*); (iii) sesuatu yang baru saja terjadi (*it is recent*); dan (iv) sesuatu yang tak terduga (*it is surprising*).

Menurut studi tersebut, semakin banyak kejadian yang memenuhi kriteria tersebut, semakin tinggi nilainya untuk dimuat sebagai berita. Lebih lanjut dinyatakan bahwa faktor-faktor penentu nilai berita tersebut, di samping terkait satu sama lain, juga membentuk implikasi ideologi pada *audiences*.

Sebagaimana ditulis oleh van Ginneken (1998) bahwa faktor-faktor personifikasi kalangan elit dan efek negatif dapat membentuk ideologi pada satu berita (*ideological shape of the news*) yang relatif lebih mudah dari faktor lainnya. Sebagai contoh, media cenderung memilih memberitakan orangnya (*personification*) daripada proses atau perubahan sosial yang terkait dengan individu yang diberitakan. Hal ini terjadi karena pemberitaan mengenai seseorang akan lebih mudah dimasukkan ke dalam kerangka pemikiran (ideologi) pembaca. Dalam pemberitaan mengenai seseorang akan dapat digambarkan secara konkret. Umumnya, seseorang melakukan aksi dalam kurun waktu pendek (semakin pendek selesainya suatu tindakan semakin baik untuk berita) dan menyediakan objek yang mudah untuk diidentifikasi/diasosiasikan dengan *audiences* (seperti dikasihani atau dibenci) dan umumnya individu yang menjadi berita adalah kalangan elit (kalangan menengah dan kaya).

Pemberitaan peristiwa yang negatif (*bad governance*, kecelakaan, bencana alam, bencana buatan manusia, krisis politik atau ekonomi, dan yang lainnya) akan lebih mudah dimasukkan menjadi berita ketimbang peristiwa yang mengandung nilai-nilai positif (keberhasilan pelaksanaan demokrasi, sukses pembangunan, peningkatan ekonomi dan perdagangan, dan yang lainnya). Hal ini terjadi karena peristiwa negatif membutuhkan waktu yang relatif pendek untuk mengakhirinya dan tidak terduga (*surprise factor*).

Dari segi nilai berita, dapat dikatakan bahwa berita-berita yang disediakan oleh penyedia berita internasional akan

lebih banyak terkait dengan pemberitaan kalangan elit negara-negara maju dan berita-berita negatif dari negara berkembang (Dunia Ketiga). Sebagaimana kita saksikan, kantor berita internasional yang memiliki perwakilan di Indonesia lebih banyak memberitakan hal-hal yang terkait dengan peristiwa negatif di Indonesia bagi *audience* di negara-negara maju yang kemudian diterjemahkan kembali oleh media-media di Indonesia.

Pejabat Pemerintah Sebagai Sumber Berita dan *Ethnocentric* dalam Berita internasional

Berita internasional kerap kali dipresentasikan sepenuhnya dari perspektif nasional (van Ginneken, 1998). Dicontohkan media berita Amerika Serikat cenderung mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini juga dikarenakan adanya situasi bahwa umumnya para pekerja pers terkonsentrasi di satu tempat (ibu kota) dan keterbatasan waktu (*deadline*) membuat penggunaan sumber berita para pejabat pemerintah menjadi pilihan yang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan serta secara ideologi mudah diterima oleh *audiences*. Hal ini juga merupakan praktik jurnalisme yang lebih memilih memberitakan tokoh daripada proses.

Jaap van Ginneken (1998) juga menulis bahwa dalam organisasi sosial dan komunikasi serta dalam sistem media tanpa disadari secara spontan dan berulang-ulang terjadi kecederungan *ethnocentrism*, sebuah situasi di mana salah satu *group* menjadi pusat segalanya yang terkait dengannya yang

menimbulkan *universal stereotype* di mana *self description* satu kelompok akan dipertentangkan dengan *stereotype* kelompok lainnya.

Dalam berita-berita internasional kita melihat adanya *North-South stereotyping* di mana orang di Utara (*Northerners*) menyatakan dirinya sebagai orang yang memiliki *a strong character, powerful military, economically vigorous, good organizers, industrious, hard working, reliable, manly, serious, dan prudent*. Sebaliknya, orang Selatan (*Southerners*) melihat dirinya *eloquent, artistic, socially refined, patient, clever, intelligent, obliging, graceful, amiable dan generous*. Sementara itu, orang Utara melihat orang Selatan sebagai orang yang *economically and military generally weak, lazy, quick and fast, amiable and oily, unreliable, wasteful, optimistic, light hearted, crafty, clever dan spineless*. Sebaliknya, bagi orang Selatan, orang Utara sangat *powerful military and economically, hard working, energetic, physically strong, slow and heavy, rough and dirty, egocentric, stingy, pessimistic, hard hearted, serious, dan fanatic*.

Berita-berita internasional mengenai Indonesia (misalnya) dalam presentasinya tidak akan terlepas dari cara orang Utara memandang orang Selatan. Sebagai contoh, meskipun Indonesia telah diberitakan berhasil mempertahankan ekonomi secara positif dalam masa krisis dan telah menjadi anggota G-20, Indonesia tetap saja diberitakan memiliki tingkat korupsi yang terburuk, birokrasi yang panjang dalam melakukan bisnis bagi orang asing, tidak menentukannya peraturan, dan yang lainnya.

Berita-Berita Peristiwa dari Dunia Ketiga (*Third World*) di Media TV Barat

Berita-berita negara ketiga (*Third World*) yang disajikan oleh TV Barat cenderung berdasarkan bagaimana cara orang Barat (Utara) melihat orang Timur (Selatan) sehingga cara pandangnya sering tidak akan netral dan tergantung budaya di mana lokasi orang yang melihatnya. TV Barat dalam memberitakan kejadian di Dunia Ketiga melihat bahwa sebuah pemberitaan memiliki 3 motif dan sub-motif sebagai berikut; (i) *social disorder; political violence, political subversion, military combat*, (ii) *Flawed Development; government corruption, human rights abuses, environmental degradation*, (iii) *Primitivism; exoticism, barbarian*. Ketiga motif tersebut juga memiliki *implied bipolar opposite*, yaitu (i) *order/stability; harmony, redemption, peace*, (ii) *successful development; ethical government, humanitarianism, environmental preservation*, (iii) *modernism; familiar, civilized* (Dahlgren dan Chakrapani, 1982).

Motif *violence* dalam pemberitaan kejadian di Dunia Ketiga oleh TV Barat dapat dengan jelas diidentifikasi oleh Dahlgren dan Chakrapani (1982) dalam cuplikan berita ABC, 15 Juni 1978 berikut ini:

“Seventeen Military Police Guards were killed and six others were wounded last night in Guatemala City,...”

Sementara itu, secara terus-menerus akan terlihat adanya simbol *westernization* dalam pemberitaan kejadian di

Dunia Ketiga, seperti penggunaan kata “*reforms*” dan “*elections*” sebagai tanda adanya perkembangan positif di Negara Ketiga. Sering juga digambarkan bahwa perjalanan negara ketiga ke arah pembangunan menuju masyarakat modern seperti di Barat tidaklah mudah karena adanya hambatan *social disorder*. Cuplikan berita CBS tanggal 27 Maret 1977 berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai hal ini:

“Unofficial reports from Pakistan say at least 7 people were killed in widespread violence during general strike yesterday. The strike was called to protest alleged rigging of recent elections won by the government of Prime Minister Bhutto”.

Kesimpulan dan Saran

Media massa dengan dukungan teknologi informasi telah menjadi ‘penghubung’ yang sangat efektif untuk mengetahui berbagai peristiwa antarkawasan. Domestikasi pemberitaan terjadi dua arah, namun dominasi Barat atas industri media global menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam pemberitaan peristiwa di negara-negara berkembang bagi *audiences* di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Proses domestikasi berita-berita internasional menjadi bagian dari proses pelaksanaan hubungan internasional.

Untuk itu, adalah tantangan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan pendekatan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosialnya agar pandangan negara-negara Barat terhadap Indonesia seperti *stereotyping* bahwa

Indonesia adalah negara yang masih mengalami *social disorder* secara bertahap dapat diubah. Hal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan pekerja pers Indonesia untuk lebih banyak menonjolkan proses (perubahan) sosial dari pada tokoh dalam pemberitaan serta memperbanyak pemberitaan hal-hal yang positif dari proses pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

Jakarta, 5 Agustus 2010

Daftar Pustaka

- Cohen, Akiba A, M. Gurevitch M., M. Levy, dan I. Roeh. 1996. *Global Newsrooms, Local Audiences: A study of Eurovision news exchange*. London: John Libbey.
- Clausen, L. 2004. "Localizing the Global: 'Domestication' Processes in International News Production". In *Media Culture and Society, Vol. 26 (1)*.
- Dahlgren, P. with Chakrapani, S. 1982. *The Third World on TV News: Western Ways of Seeing the Others*. In W. Ad.
- Fiske, J. 1990. *Introduction to Communication Studies*. (2nd edition). New York: Routledge.
- Sereberby-Mohammadi, A. 2001. "The Global and the Local in International Communications". In Curran, J. & M.

Gurevitch (Eds.). *Mass Media and Society* (3rd edition).
London: Edward Arnold.

Said, E. 1997. *Covering Islam: How the Media and the Experts
Determine How See the Rest of the World*. New York:
Vintage

Van Ginneken, J. 1998. *Understanding Global News: A
Critical Introduction*. London: Sage.

www.deplu.go.id

New Regimes: A Central Borneo Trajectory of ‘Globalisation’

Dave Lumenta

Research Center for Anthropological Research (PUSKA)
University of Indonesia

dlumenta@gmail.com

In-House Training Seminar “Globalisasi dalam Perspektif
Kajian Wilayah”

Research Center for Regional Resources (PSDR-LIPI)

(Working Paper)

Introduction

Outside the ideological connotations of ‘globalisation’, Southeast Asia has always been ‘global’ throughout its history. Strategically situated on the major maritime trade routes linking ancient Europe, India, and China, Southeast Asia has a long dynamic history marked by shifting powers and the intense movement of people, commodities, and cultural flows. The region’s fluidity and cosmopolitanism is amply demonstrated by the abundance of cross-cultural influences shared within the region, such as technology, religious syncretism, language, diasporas, and even food.

The arrival of colonialism and the subsequent emergence of post-colonial nation-states in the region has significantly reconfigured and re-ordered the patterns of human flows within the region. Border regimes have become prominent regulators for the movement of peoples and commodities across boundaries, such as the establishment of customs and immigration controls, designated international routes and port of entries.

On the other hand, numerous upland regions across mainland Southeast Asia, peripheral maritime regions such as the Sulu Sea, the Celebes Sea, and the internationally-partitioned island of Borneo, remain quasi-open and fluid spaces where peoples and commodities traverse international boundaries *relatively* unchecked by border controls. This indicates that states rarely reach that idealized omnipotence to exercise total and coherent power over space and societal mobility. This is especially true for post-colonial states around the world. State borders throughout Southeast Asia have generally been established in an arbitrary fashion, where ethnic, linguistic, social, and economic borders never neatly intersected with formal state boundaries drawn on maps. As a result, shared ethnicity, language, identities, and economic interconnectivity remain to transcend many state boundaries. As such, the nation-state remains to be an alien and contested idea in many upland borderland regions around Southeast Asia (see Scott, 2009; Van Schendel, 2005). However, this does not imply that national identities have made no inroads in these seemingly 'stateless' and 'unruly' backyards. Even a remote

but culturally fluid region such as central Borneo has not escaped. I have chosen to follow a materialist approach linking the differentiation of national identities to the process of capitalist globalization, based on a multi-sited ethnographic study focused on mobility history conducted from 2000 to 2007 among the Kenyah, an ethnic group residing in central Borneo.

The history of Kenyah mobility from the Apokayan highlands (in today's Indonesia) into Sarawak (Malaysia) provides a tragic example of how an ethnic group became gradually alienated from Sarawak's social and economic fabric in which they were an integrated and significant part of. My final examination looks at the capitalist-based structural ordering of the Sarawak space itself, which has been an effective substitution to any organizational power of the state in bringing about social demarcations between 'Indonesians' and 'Malaysians' in central Borneo.

Theoretical Setting

Traditional mobility practices and spatial orientation of the most remote communities throughout the world were often tied to efforts in seeking shorter and favourable trade routes to the nearest markets. The persistent mobility practices in borderland regions in defiance of today's state boundaries are often rooted in ancient trade routes that may have been the most efficient links between supply regions to regional markets. These very same routes may be as efficient today as it has been in the past,

serving the same purpose under contemporary capitalist modes of development as it has been under maritime-trade regimes of the ancient past. During the early stages of mercantilist capitalism in Southeast Asia, traditional mobility practices such as trading expeditions were increasingly suppressed by colonial powers exactly because it was all too compatible and responsive to the demands of the capitalist system itself—bypassing trade monopolies, colonial tax barriers, and inefficient trading routes.⁵ Up to this point, it appears that both capitalism and people who freely move around are not conveniently compatible to state projects—each having their own logic and praxis of space.

Nation-state spaces operate on the principle of fixity and bounded homogeneity. It is indeed the inherent obsession of states to tie people down into places and to assign them coherent identities, or ‘geobodies’ (e.g. Scott, 1998; Migdal, 2004; Thongchai, 1994). While states are inherently constructed to function as spatial barriers, capitalism on the other hand perpetually strives to annihilate spatial barriers (e.g. Marx, 1973). One major theme to the discussion of border regimes often revolves around two dialectical historical trajectories—partitionary nation-state building that calls for spatial partitions and sedentarization of peoples on one hand;

⁵ For example, the diaspora of Bugis merchants towards the Malacca Strait was at a certain stage the direct result of Dutch efforts to suppress direct trading links between Makassar and British merchants which undermined Dutch trading interests in the region. (see Poelinggomang, 2002).

and capitalist-driven globalization calling for open borders to facilitate the unhindered circulation of capital and labor on the other.⁶

The particular focus of Marxist geography (e.g. Lefebvre, 1974; Smith, 1984) has been the mechanisms through which space is appropriated—how it is constructed, visualized, designated, and seized, and projected back—to serve capital (or class) interests. In order to overcome natural barriers in the landscape to accelerate the extraction of resources, the re-organization of space is then a pre-requisite. Capitalism requires its own efficient order of space that is relatively autonomous from the inefficiency of national space orders on one side and natural barriers on the other. The invention of new modes of production, technology, and collaboration with states enables the speedy reconfiguration landscapes to accelerate the efficiency of bringing resources from its natural deposits to markets.

Terrestrial developmentalism has been a major undertaking throughout the world. The invention of roads, logging roads, ports, dams, towns, the sedentarization of human settlements, transmigration schemes are all manifestations of capital drive to subject the landscape. With these inventions come the embedded social structures that are designed to conform to the maximization of capital accumulation.

⁶ Ishikawa (2008), for example, referred to these two forces as ‘the organizational power of the state’ and ‘the structural power of capitalism’.

Riverine Spaces: Central Borneo's Past Social, Economic, and Political Organization

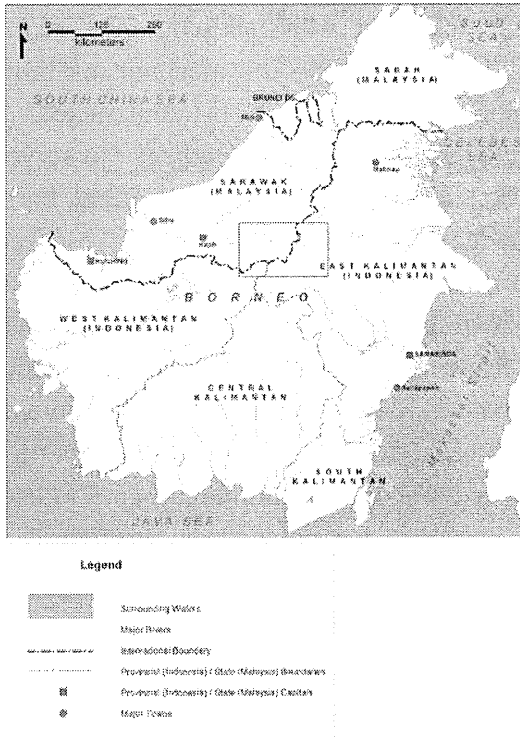


Figure 1. Research Site: Central Borneo (the Apo Kayan plateau marked by the square box)

State borders throughout Southeast Asia have generally been established in an arbitrary fashion, where ethnic, linguistic, social, and economic borders never intersected neatly with

formal state boundaries drawn on maps. As a result, shared ethnicity, language, identity, and economic interconnectivity remain to transcend many state boundaries.

The Island of Borneo is not only a fitting example of these arbitrary state partitioning processes (being partitioned into three different nation-states), but it serves as an ideal site of inquiry to examine the seemingly absence of effective state border regimes and the far penetrating effects of the capitalist re-ordering of the landscape.

The area of inquiry is focused on a continuous geographical and social space that I will loosely define as central Borneo, which encompasses parts of the Malaysian State of Sarawak and the Indonesian Province of East Kalimantan (see Fig. 2.). This region constitutes a transnational social-cultural continuum that is rooted in the continuing flows of peoples, commodities, and ideas between river basins for at least three centuries. The colonial partitioning of Borneo by the 1891 Anglo-Dutch Boundary Agreement was primarily based on the division of river basins.⁷ It soon became evident that the mere division and control over river basins did not effectively brought about the smooth integration of these basin societies into the sphere of colonial states consistent to the partition agreement.

⁷ See "Convention Between Great Britain and the Netherlands Defining Boundaries in Borneo—Signed at London, June 20, 1891" in *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden*.

Social and economic transbasin relationships between present day Kalimantan and Sarawak, characterized by inter-basin trade oriented westwards—hence, through Sarawak—towards the South China Sea, was a feature that pre-existed the arrival of colonial states in Borneo. Forest and animal products such as *gutta percha*, India rubber, rhinoceros horns, bezoar stones, and later eaglewood were primarily catered towards Chinese market demands throughout Southeast Asia. Social networks surrounded these chains of commodity flows, which in turn determined the mobility orientation of many interior peoples in Central Borneo towards the South China Sea (see Ooi Keat Gin 1997).

This may also explain why many borderland communities in present-day West and East Kalimantan on the Indonesian side of the border maintain closer social affinities with riverine communities in Sarawak. In addition, the absence of any hegemonic Sultanate on Sarawak's coastal estuaria may also have been an attraction for the westward flow of trade. This is in total contrast with Borneo's east coast where coastal Sultanates like Kutai, Bulungan, and Berau heavily taxed commodities coming from the interior. For example, as our case study will demonstrate, the Kenyah of the Apokayan were particularly reluctant, if not defiant, to Dutch efforts in the early 20th century to re-orient their trading activities eastwards away from Sarawak (Elshout, 1923).

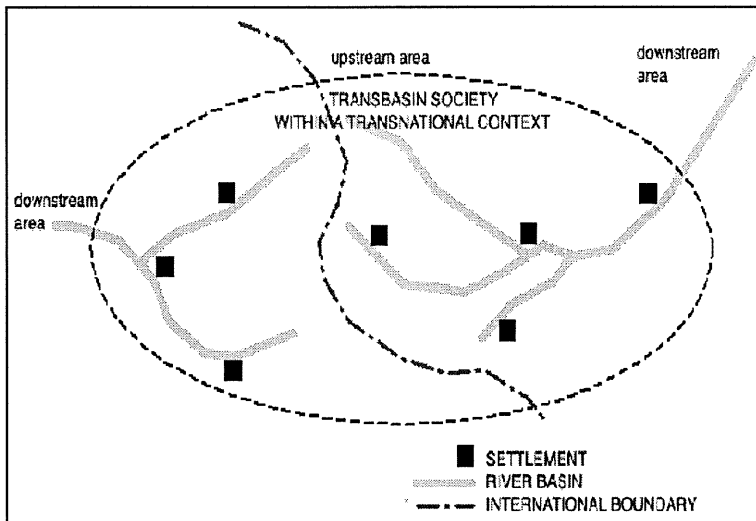
Colonial Sarawak (1841–1946) on the other hand, under its regime of three successive ‘White Rajahs’ (James Brooke, Charles Brooke, and Vyner Brooke) sits as an anomaly among its colonial contemporaries. Compared to British and Dutch colonies in the region, Sarawak was immensely poor in terms of mineral deposits (oil was only discovered in the 1920s) and soil fertility. Lacking significant export revenues, Sarawak’s bureaucracy was small and underfunded. As a result, its style of governance was largely personal and informal, enabling Sarawak officials to have close rapport with its indigenous subjects.

Viewing themselves as protectors for the status quo of ‘native’ traditional ways of life, the Brookes resisted any attempt to bring Sarawak under the influence of land-hungry British plantation capitalists. They believed that loss of native lands to capital interests would bring turmoil to Sarawak. The sole solution to Sarawak’s dire economic situation was to promote the free trade of jungle products—which the Brookes believed would bring a sensible and non-destructive pace of ‘civilization’ to the native ethnic groups of Sarawak. The logical pre-requisite to boost the free trade of jungle products was to keep transbasin traffic of people and commodities open.⁸

Transbasin trade, interethnic social interactions, and migrations have been a constant feature of social organization among

⁸ See Reece (1988), Ooi Keat Gin (1997)

Central Borneo's communities (Rousseau, 1990; Sellato, 2001; Eghenter, 1999). Rousseau (1990: 301–302) suggests that Central Borneo societies can be better analysed as river basin societies instead of as closed village units. Rousseau's model can be applied to transnational transbasin societies to analyse many Central Borneo groups that have extensive transbasin relations under the current international partition.



The establishment of the international boundary had for a long time, at least until 1985, failed to disrupt the close social and economic inter-connections between the Apo Kayan plateau with Sarawak. In fact, continuing trade with Sarawak was a major income for the Kenyah that enabled them to pay

Dutch door-taxes. The dismal possibilities for integrating the Apokayan's economy into the Dutch and subsequent Indonesian space has so far rendered the region as an economic liability, and all successive governments on the Dutch/Indonesian side tacitly acknowledged that the Apokayan's economic survival rests largely on profits and revenues generated from neighbouring Sarawak.⁹

Kenyah Mobility from East Kalimantan to Sarawak (1900–2007)

The Kenyah, an umbrella ethnic identity for several swidden agricultural groups who are culturally, historically, and linguistically related, constitutes the majority of the population in central Borneo, a large area encompassing the Indonesian Province of East Kalimantan and neighbouring Sarawak. Originating from the Baram river basin in Sarawak, the Kenyah have dispersed into other river basins, resulting in their current distribution in both Indonesia (approx. 40,000—estimates in 2000) and Malaysia (7,000 in 2000).

The cluster of Kenyah groups occupying the Apo Kayan plateau in East Kalimantan, for short 'the Apo Kayan Kenyah', is one among numerous 'Dayak' groups who have witnessed the state-partitioning of their homelands since the emergence of colonial states and boundaries. What places the

⁹ Lumenta (2008: 112–132).

Apo Kayan Kenyah in a geographically unique situation is their close proximity to at least five major Bornean rivers (the Baluy, Balleh/Rajang, Kayan, Baram, and the Mahakam), and their extensive trans-basin extent of social relations encompassing the international boundary.

Being strategically located at the headwaters of major river basins that flow from the Apokayan—Iran highlands in centrifugal directions to Borneo's west and east coasts, the Kenyah played a central role in bringing forest products (and later agricultural labour) from the interior to downstream commercial centers. This was undertaken through a traditional mobility practice, principally undertaken by males, called *peselai* (lit. 'to go on a long journey'), which was previously rooted in both headhunting trips and the prolonged collection of jungle produce. *Peselai* also evolved into massive trading expeditions wherein 100 to 500 males would usually participate in completing 3–6 month roundtrips to coastal areas by canoes.¹⁰ A *peselai* trip was socially significant to the education of young males, not only as a rite of passage where they could prove their bravery and worthiness as future husbands, but also where they learned about the social world at large, the intricate networks of rivers, ethno-history, commerce, and dealing with other ethnic groups.

The Apo Kayan's centrality to the flow of jungle products flowing from the uplands was noted by Charles

¹⁰ See Lumenta (2008), Whittier (1973), Conley (1978)

Brooke, the second 'White Rajah' of Sarawak. He invited several Kenyah leaders on a peselai expedition to Kuching in 1899 and encouraged the Apo Kayan Kenyah to migrate to Sarawak under his protection. In turn, the Kenyah leaders who looked at the advantage of trading with Sarawak in the west as opposed to the Kutai sultanate in the east welcomed Charles Brooke's invitation. The Apo Kayan's integration into Sarawak was coincidentally cancelled due to the arrival of Dutch explorer, Dr. Nieuwenhuis in early 1901 who offered direct Dutch protection for the Kenyah against Sarawak Iban raids which the Kenyah leaders duly accepted.¹¹

Despite Dutch reservations, Kenyah peselai expeditions from the Apo Kayan persisted in trading with Sarawak although inter-tribal hostilities, particularly with the Sarawak Ibans, remained a major obstacle that reached a peak in 1921 when major headhunting incidents occurred.¹²

The 1924 Kapit Peacemaking Agreement between Sarawak, Dutch, Iban, Kayan, and Kenyah leaders had far-reaching impact for the Apo Kayan Kenyah. Peace with the Sarawak Ibans not only secured the liberalisation of Kenyah access to Sarawak river basins and coastal markets, but also enabled the Kenyah to enter sharecropping agreements with Sarawak Ibans, and the labour markets in Sarawak's coastal logging and oil industries.

¹¹ See Beccari (1904), *Sarawak Gazette* (March 1, 1901), Smythies (1955)

¹² *SG* (October 1, 1924)

The period between 1924 to 1985, with brief disruptions during the Japanese occupation (1941–1945) and the *Konfrontasi* (1963–1966) marked the ‘golden years’ of Peselai expeditions from the Apo Kayan into Sarawak. The Kenyah not only established themselves in the aforementioned important economic niches, but also managed to extort important cultural influences over other indigenous ethnic groups throughout upriver Sarawak. Peselai groups from the Apo Kayan brought not only influence over the arts (to a point where they were even invited to decorate the walls of the Sarawak Museum in Kuching in 1959–60), but also influence over religion.¹³

The Bungan faith, a reformed version of the original Kenyah belief system invented in the Apo Kayan, quickly spread and won massive converts in Sarawak between 1947–1955. This was soon followed by Christianity, which Christian Kenyah from the Apo Kayan brought over to Sarawak during the same period. They were also responsible for the translation of the first Kenyah-language Bible, sponsored by the Borneo Evangelical Mission, widely used in Sarawak until today.¹⁴ As agricultural and logging laborers, the Apokayan Kenyah enjoyed equal status as Sarawakians, particularly during the British period where they were paid equal wages as Sarawakians, received health benefits, and legal protection as

¹³ See Langub (1997) for example

¹⁴ See Prattis (1963) and Sidang Injil Borneo (1988)

workers. It was easy for those coming to Sarawak without border passes to secure work permits from British residents.

During the mid-1970s Peselai teams began to experience the effects of the increasing criminalization of 'illegal' entry through tightening of immigration controls, marked by the increase of police checks at major logging towns, such as Sibul, Bintulu, and Miri. It was during the early 1980s when local Sarawakians, mainly Ibans, Kayans, and local Kenyah, started to gradually pull out from hazardous positions in logging jobs (i.e. chainsaw operators), which further compounded labour shortages in Sarawak's logging industry.¹⁵ Improved education among Sarawakians also resulted in their upward mobility in occupying middle to higher level positions in the logging camp hierarchies. This left an increasing vacuum in the lower rank positions, which were most of the part plugged by the increasing numbers of Apokayan Kenyah workers from Indonesia.

Nationwide Malaysian police raids on illegal migrants, starting with *Nyah* ('Get Rid') Operations in the mid-1980s, restricted Kenyah labour migrations from heavily patrolled urban areas. Nonetheless, many Indonesian Kenyah could pass off as local Sarawakians as police officers were usually unable to distinguish them from the local Sarawak Kenyah populace. Some even cut their hair in traditional Kenyah fashion to blend

¹⁵ Inadequate insurance and compensation rendered logging jobs more and more unattractive in the face of better jobs that Sarawakians could find in urban areas.

in.¹⁶ In addition, significant proportions of the local Sarawak populace did not possess Identity Cards themselves. The ongoing citizen registration process in upriver areas was an opportunity for Indonesian Kenyah migrants to naturalize themselves with the help of local Kenyah hosts acting as guarantors. A local Kayan politician with links to Kenyah leaders in the Apokayan, Tajang Laing, accordingly provided 200 Indonesian Bakung Kenyah plantation workers at Sepakau with Sarawak Identity cards around 1985.¹⁷ Following nationwide crackdowns on illegal immigrants, the role of Sarawak Kenyahs and politicians who had personal or kinship relations with peselai team members became more prominent in providing protective measures against police checks. This, however, placed many Apokayan Kenyah in assymetrical power relations with their Sarawak kin through debt-bondage, servitude, the rise of patronage, and the creation of an Indonesian Kenyah 'underclass' in general.

Two developments have come to significantly alter the social-economic relationship between the Apokayan Kenyah and Sarawak. First, the successive timber booms in Sarawak, which peaked in the 1970s and onwards, have marginalized the longstanding trade of jungle products into and from Sarawak. Losing one of their primary economic niches, the Apokayan Kenyah's role in the Sarawak economy was relegated to

¹⁶ The traditional Kenyah hairstyle is marked by a long pigtail in the back. This has gone out of fashion in Kalimantan since the 1960s, but preserved among the Sarawak Kenyah until quite recently.

¹⁷ Interview with Dato' Tajang Laing, Kuching, March 2003.

supplying the pool of labour under the vast hierarchy of the timber industries. In addition to being relegated to the lower strata of the production hierarchy, the increased formalization of the Malaysian–Indonesian border in the 1980s placed them within the category of ‘illegal migrants’ without access to insurance and labour rights. It is no longer safe for Apokayan Kenyah to enter towns in Sarawak to cash in their wages at local banks without the risks of being apprehended by the increasing police checks in downriver regions. They often have to rely for camp canteen managers to cash it for them, subject to a 5% commission.

Hitching on logging pickup cars is not always a convenient undertaking. Sarawak Iban drivers, higher in the ranks within the camp hierarchy, often refuse to take the Apokayan Kenyah workers on their rides unless they pay a hefty fee of RM 50 (although camp regulations explicitly forbid any form of payments or bribes made for the utilizing of logging vehicles).

Their insecure status as illegal migrants has also affected the changing preferences of cross-border marriages even among the Kenyah. It was common up to the early 1980s for Apokayan males to marry Sarawakian females. By the 1990s cross-border marriage rates in central Borneo have gone down. Even in the small numbers of recent marriages, the

trends have reversed to Sarawakian males marrying Indonesian females.¹⁸

Recent younger generations from the Apokayan arrive in Sarawak with scant knowledge of the geography, such as village locations, rivers. Being confined to the logging camps, they have little contact with the outside world. Although the extensive logging roads have made travelling around Sarawak, especially to logging towns much easier, they no longer meander through the riverine clusters of Kenyah and Kayan villages that used to function as transit sites, social safety nets or sites for socializing in the past. The cosmopolitanism of previous Kenyah generations, who could freely move around, interact, socialize, negotiate, absorb, and transmit cultural ideas, has been lost among the younger ones. Peselai journeys of today are reduced to labour migrations to logging camps.

From Riverine to Terrestrial Space Ordering: the New 'Borders'

The history of Kenyah mobility into Sarawak demonstrates the changing nature of space ordering since the arrival of colonial

¹⁸ For example, in the village of Long Mekaba, a Kenyah settlement in the Baram, there was a time around 1978 when six Indonesian Kenyah males managed to legally marry with females from the local populace. Only one cross-border marriage occurred in 2000 when a Sarawak Kenyah male married an Indonesian Kenyah female, but given the lack of the bride's birth certificate or passport, the Sarawak authorities refused to legalize the marriage. (Interview with Inggong Lahang & William Ukeng, Long Mekaba, January 2003.)

states and the resulting impact it has on cross-border social relations and the emergence of state border regimes. The early Sarawak state under the Brookes chose to adjust itself within the indigenous riverine-based social order. It did so by facilitating the improvement social relations between riverine communities that extended from Sarawak's west coast up to the Apokayan in Dutch Borneo. Pacification of the interior and the liberalisation of human traffic through open borders and rivers was viewed as essential for the Sarawak economy. By basing itself on this riverine-based governance over space, the Brookes considered the Apokayan as an integral social and economic space of Sarawak. This entailed that Sarawak under the Brookes had little interest in upholding the Anglo-Dutch international boundary. This longstanding riverine space order existed well into the transitional period under British rule (1946–1963). The Kenyah of the Apokayan were not viewed as 'Indonesians' or 'aliens'.

Conditions started to change with the resurgence of Sarawak's logging industry which spread inwards to the interior after *Konfrontasi* ended in the late 1960s. The logging industry, Sarawak's major revenue earner, is basically a terrestrial enterprise that partitioned lands into neatly bounded concession areas. The accessibility to timber reserves requires the introduction of new transportation modes and infrastructures such as trucks, pickups, and land roads. The extensive network of logging roads not only changed the physical landscape throughout Sarawak, but it has also increasingly shifted social organization away from the quasi-

egalitarian order of riverine relationships to the highly hierarchized world of logging camps. The social order in Sarawak has gradually shifted from riverine to terrestrial based relations.

It is within this hierarchy world of logging camps where the national borders are created and reproduced. Far from being a territorial border, the border separating Indonesians from Malaysians in the central Borneo context is manifested through asymmetrical power relations in everyday life experiences: wage differences, the dependency on Malaysian Iban drivers, the small prospective of finding a Sarawakian spouse, illegal deductions from salaries, and the narrowing access to a wider social world outside logging camps in general.

Embedded in the history of Kenyah mobility is the shifting context from Sarawak as an open and fluid riverine-based social space under colonial rule to a closed and stratified social space ordered by capital logic. It is hoped that the presented case study reverses some assumptions on the linearity of post-war 'globalization' and its saturated jargonism about the creation of a 'borderless world' by providing contrary evidence that latter-day globalization in the form of capitalist development has increasingly created new border regimes that increasingly equates national identities with differentiations of class.

With the blurring between nation-state and corporate interests, the most effective border regime to support the maximization of profits and minimization of (labor) costs would be a model that operates on hierarchical rather than territorial / spatial containment. The two historical trajectories that of the nation state and capitalism, have found a working equilibrium marked by the containment of people not through spatial partitions and borders, but through their containment within fixed hierarchies of capitalist production.

BIBLIOGRAPHY

- Beccari, O. 1904. *Wanderings in the Great Forests of Borneo* (1986 Reprint). Singapore: Oxford University Press.
- Chew, D. 1990. *Chinese Pioneers on the Sarawak Frontier, 1841-1941*. Oxford: Oxford University Press.
- Elshout, J.M. 1923. *Over de Geneeskunde der Kĕnja-Dajak in Centraal Borneo in Verband met Hunnen Godsdienst*. Amsterdam: N.V. Johannes Müller.
- Ishikawa, N. 2008. 'Centering Peripheries: Flows and Interfaces in Southeast Asia', Kyoto Working Papers on Area Studies No. 10 (G-COE Series 8), Dec, 2008.
- Langub, J., 1997. "Padan, Tusau, 1933–1996. A Memorial." *Borneo Research Bulletin*, Vol. 28, pp.15–18.
- Lefebvre, H., 1974. *The Production of Space*, (D. Nicholson-Smith, transl.). Oxford: Blackwell.
- Lumenta, D., 2008. 'The Making of a Transnational Continuum: State Partitions and Mobility of the Apokayan Kenyah in Central Borneo, 1900–2007'. Dissertation. Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University.

- Marx, K., 1973. *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft)*. (M. Nicolaus, translation). London: Penguin.
- Migdal, J., 2004. *Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ooi Keat Gin, 1997. *Of Free Trade and Native Interests: The Brookes and the Economic Development of Sarawak, 1841-1941*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Prattis, I., 1963. "The Kayan-Kenyah "Bungan Cult"." *Sarawak Museum Journal* Vol. XI Nos 21–22 (New Series) July–Dec 1963, pp. 64–87.
- Scott, J., 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, J., 2009. *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Sidang Injil Borneo. 1988. *Buku Cenderamata Sidang Injil Borneo Sarawak*. Miri: Sidang Injil Borneo.
- Smith, N. 1984. *Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space* (second edition, 1990). Oxford: Basil Blackwell.

Smythies, B.E. 1955. "Dr. A.W. Nieuwenhuis. 'A Borneo Livingstone'" *Sarawak Museum Journal* No. 29 (1955), pp. 493–509.

Thongchai Winichakul, 1994. *Siam Mapped—A History of the Geo-Body of a Nation*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Rousseau, J. 1990. *Central Borneo*. Oxford: Oxford University Press.

Van Schendel, W. 2005. 'Spaces of Engagement: How Borderlands, Illicit Flows and Territorial States Interlock', in *Illicit Flows and Criminal Things: States, Borders and the Other Side of Globalization* (W. Van Schendel & Itty Abraham, eds.), pp. 38–68.

Whittier, H.L., 1973. *Social Organization and Symbols of Social Differentiation: An Ethnographic Study of the Kenyah Dayak of Kalimantan (Borneo)*. Ph.D. dissertation, Michigan State University, East Lansing.

MASYARAKAT EROPA DALAM MERESPONS GLOBALISASI DITEROPONG DARI KAJIAN WILAYAH¹⁹

Oleh:

Dr. Siswanto, M.Si.

PENDAHULUAN

Jika kita sedikit menengok ke belakang, tidak dapat dipungkiri bahwa Eropa merupakan pelopor peradaban manusia dan Ilmu Pengetahuan. Para filusuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Sokrates telah meletakkan dasar-dasar Ilmu Politik dan Sains. Selain dari itu, Eropa mengalami abad-abad pencerahan yang mengubah secara total kehidupan manusia. Semula kehidupan didominasi oleh kekuasaan dan doktrin-doktrin agama, lalu dibimbing oleh pandangan-pandangan ilmu pengetahuan dan rasio. Selanjutnya, di Eropa terjadi Revolusi Industri yang telah mengubah “wajah” kehidupan ekonomi dan sosial. Proses produksi dan transportasi yang pada awalnya menggunakan

¹⁹ Makalah ini disampaikan pada Seminar IHT PSDR-LIPI, Globalisasi ditinjau dari Kajian Wilayah, tanggal 5 Agustus 2010

tenaga manusia atau hewan berubah menggunakan tenaga mesin. Akibat perubahan dalam faktor produksi ini, efisiensi dan jumlah produksi mengalami perubahan signifikan.

Dewasa ini, Eropa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang disegani. Terdapat segi-tiga kekuatan ekonomi internasional, yaitu AS, Jepang, dan Uni Eropa. Tiga pilar ekonomi ini mendominasi tata ekonomi internasional dewasa ini. Meskipun demikian, terdapat kekuatan ekonomi pengimbang, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina. Salah satu indikator kuatnya ekonomi Eropa adalah kuatnya mata uang Euro. Mata uang ini merupakan alat pembayaran yang cukup kuat nilainya walaupun sempat mengalami guncangan akibat krisis ekonomi yang melanda Eropa, khususnya Spanyol. Keberadaan negara-negara Eropa juga memiliki posisi yang kuat atau memiliki *power* yang besar dalam forum WTO. Akibatnya, Eropa menentukan arah perdagangan dunia, baik yang menyangkut tarif maupun pasar bebas.

Selanjutnya, UE merupakan kekuatan politik yang berpengaruh di dunia. UE adalah negara-negara berdaulat yang berintegrasi karena adanya kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini pertama diwacanakan oleh Menteri Luar Negeri Prancis,

Robert Schuman, pada 9 Mei 1950 yang mengkhawatirkan terulangnya perang yang memporak-porandakan Eropa (Perang Dunia ke-2). Wacana ini mendapat dukungan negara-negara Eropa lainnya, seperti Jerman, Italia, Belanda, Belanda, dan Luksemburg. Realisasi dari gagasan ini adalah terbentuknya masyarakat batu bara dan baja Eropa sebagai cikal bakal UE pada tahun 1951 di Paris. UE dan AS dewasa ini boleh dibilang mengontrol sistem internasional pasca Perang-Dingin. Kita menyaksikan berbagai persoalan di dunia melibatkan peran kekuatan negara-negara Eropa atau UE untuk mencapai penyelesaian. Misalnya saja penyelesaian konflik Timur Tengah melibatkan kekuatan Eropa di samping kekuatan AS dan Rusia. Pendeknya Eropa menjadi mitra AS dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Sementara itu, globalisasi diartikan sebagai pergerakan masyarakat, barang, jasa, informasi, dan ide yang melampaui batas-batas negara (Hodson, 1978: 102). Globalisasi secara tidak langsung mengurangi sekat-sekat antar-negara. Berbagai unsur-unsur di atas bergerak dari suatu negara ke negara lain secara bebas dan cepat, khususnya informasi. Segala bentuk informasi mudah merambah dari negara ke negara lain. Jadi,

suatu kejadian yang terjadi di suatu negara dengan cepat diketahui di negara lain. Bahkan, efeknya dapat dirasakan di negara lain. Seolah-olah bumi menjadi sempit. Penduduknya merupakan suatu kesatuan yang saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain.

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang luas, namun dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Misalnya, globalisasi di bidang ekonomi bisa dilihat dalam isu perdagangan bebas. Rezim perdagangan dunia WTO membicarakan soal kebijakan perdagangan internasional, khususnya perdagangan bebas. Produk barang dan jasa diharapkan mudah bergerak dari negara lain tanpa memperoleh hambatan, baik tarif maupun non-tarif. Globalisasi di bidang politik dan ideologi bisa dipahami dari berkembangnya isu demokratisasi dan Hak Asasi Manusia. Semangat demokratisasi yang terjadi di suatu kawasan bisa menular ke kawasan lain. Isu demokratisasi di ETT menumbangkan rezim komunis yang otoriter satu demi satu. Globalisasi di bidang budaya bisa dikaitkan dengan gaya hidup yang ada di suatu kawasan, diikuti oleh suatu masyarakat di kawasan lain. Misalnya, budaya populer AS diikuti oleh sebagian masyarakat di tempat lain. Hal ini bisa dilihat dari

maraknya masyarakat menikmati McDonald, Coca Cola, dan Kentucky Fried Chicken. Mode pakaian bergaya *Blue Jeans* yang disukai kaum muda AS seperti Levi's juga disenangi oleh masyarakat di negara lain.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami dinamika masyarakat Eropa yang terkait dengan isu global, dalam hal ini demokratisasi dilihat dari perspektif Kajian Wilayah. Respons masyarakat Eropa terhadap isu-isu dalam konteks global tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain atau guna mengambil hikmahnya. Segi-segi positif dari masyarakat di negara-negara Eropa bisa menjadi teladan bagi negara lain seperti Indonesia. Sebaliknya, segi-segi negatifnya justru menjadi peringatan untuk dapat dihindari agar aspek negatif itu tidak terjadi pada negara kita. Pengalaman negara lain menjadi penting sejauh dapat memanfaatkannya dengan baik sebagai cermin untuk memperbaiki keadaan.

Eropa merupakan kekuatan dunia yang sangat berpengaruh sehingga beberapa permasalahan yang melanda kawasan itu perlu dipahami, khususnya dalam konteks globalisasi dalam bidang politik. Di penghujung abad ke-20, masyarakat dunia dikejutkan oleh merambatnya demokratisasi ke ETT yang

datangnya justru bukan dari Eropa Barat yang terkenal sebagai pelopor demokrasi, tetapi dari Uni Soviet atau Rusia yang sebelumnya dikenal sebagai pimpinan negara komunis dengan tatanan politik otoriternya. Sehubungan dengan hal itu, sebuah pertanyaan yang relevan untuk diajukan, yaitu bagaimana sebenarnya masyarakat Eropa merespons munculnya isu demokratisasi ?

TINJAUAN TENTANG STUDI WILAYAH EROPA

Terlebih dahulu perlu dikemukakan hal yang dimaksud dengan studi wilayah dalam tulisan ini. Studi wilayah di sini adalah studi wilayah internasional atau studi kawasan internasional untuk membedakan studi kawasan yang dikembangkan di dalam negeri. Misalnya, studi kawasan pedesaan, studi kawasan daerah terpencil, studi kawasan daerah tertinggal, dan studi kawasan daerah perbatasan yang belakangan ini ramai dilakukan. Misalnya, studi wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Timur, Papua, dan NTT.

Selanjutnya, studi wilayah di sini diartikan atau didefinisikan sebagai usaha untuk mempelajari, meneliti, dan memahami suatu wilayah internasional secara mendalam dan bersungguh-

sungguh (Alfian, 1980: 1). Berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah yang diteliti itu perlu dipelajari secara cermat. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya meneliti dan memahami dari aspek politik saja, melainkan juga dari segi-segi lain seperti kebudayaan, ekonomi, sejarah, pendidikan, geografi, sosial, militer, penduduk, dan agama. Kehidupan masyarakat tersebut dipelajari secara komprehensif atau menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek saja, yaitu dari kehidupan masyarakat tersebut. Dengan demikian, hasilnya adalah suatu hasil kajian atau laporan penelitian yang utuh.

Dalam hal ini, perkembangan studi wilayah internasional berhubungan erat dengan perkembangan Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Dalam hal ini, Studi wilayah internasional mendapat dukungan dari disiplin Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Sejarah, dan Ilmu Ekonomi. Studi wilayah internasional menggunakan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu tersebut. Keberadaan studi wilayah internasional sebagai perspektif untuk memahami suatu kawasan menjadi semakin komprehensif dan tajam karena memanfaatkan alat bantu analisis dari Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (Ibid.10). Studi wilayah semakin lama semakin berkembang menjadi

suatu kajian yang memiliki arti penting dalam menjelaskan berbagai persoalan di berbagai wilayah.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kajian wilayah dapat dikatakan sebagai suatu studi yang bercirikan interdisiplin. Dalam pendekatan interdisiplin, masalah sosial didekati, dianalisis, dan dikaji dari berbagai disiplin Ilmu sosial dan Kemanusiaan secara serentak atau dalam waktu yang bersamaan (Sumaatmaja, 1980: 123). Masalah sosial yang kompleks tidak cukup memadai jika hanya dikaji dari satu disiplin ilmu saja. Pendekatan interdiplin menjadi solusi alternatif yang bisa digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah kompleks yang timbul di masyarakat. Misalnya, dinamika masyarakat terkait dengan soal kemiskinan, pendidikan, pengangguran, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Studi wilayah Eropa adalah suatu kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di wilayah Eropa secara keseluruhan dan kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di negara-negara Eropa. Ketika suatu kajian dilakukan terhadap dinamika sosial di Eropa secara keseluruhan, objek materialnya atau objek telaahnya adalah persoalan-persoalan terkait dengan kebijakan Uni Eropa (UE). Pembicaraan soal wilayah Eropa adalah tidak

realistis jika mengabaikan keberadaan UE sebagai institusi yang dominan di Eropa bahkan di dunia. Sementara itu, suatu kajian yang difokuskan terhadap persoalan sosial di suatu negara Eropa, objek materialnya adalah persoalan-persoalan di masyarakat dan kebijakan dari pemerintah negara tersebut. Kajian ini lebih sempit sifatnya karena diarahkan kepada persoalan-persoalan sosial yang timbul di negara Eropa saja. Dengan demikian, studi wilayah Eropa dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap isu-isu yang timbul di kawasan Eropa (Kajian UE) dan isu-isu yang timbul di negara-negara Eropa. Kajian wilayah Eropa terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kajian institusional atau kelembagaan dan kajian negara.

Sehubungan dengan hal itu, Bidang Perkembangan Eropa PSDR-LIPI ke depan diharapkan akan mengembangkan beberapa kelompok kerja dari para penelitinya. Hal ini dimaksudkan untuk merespons minat para peneliti sendiri dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Kelompok kerja penelitian itu meliputi sebagai berikut: 1) Kelompok Kerja Eropa Barat, 2) Kelompok Kerja Eropa Timur, dan 3) Kelompok Kerja UE. Penelitian yang sedang berjalan saat ini, Kelompok Kerja Eropa Barat, sedang meneliti permasalahan pekerja migran di

Belanda. Kelompok Kerja Eropa Timur sedang mengkaji permasalahan lingkungan hidup di Ceko. Sementara itu, Kelompok Kerja UE memang saat ini tidak melakukan kajian karena sebagian peneliti bidang Eropa sedang melanjutkan studi di luar negeri.

Selanjutnya, beberapa penelitian sudah dilakukan PSDR terhadap dinamika masyarakat Eropa. Para peneliti Eropa PSDR mendalami berbagai persoalan di Belanda. Oleh karena itu, serangkaian kegiatan penelitian telah dilakukan di kawasan dan negara ini, yaitu tahun 2005 dengan judul penelitian *CRISES AND MIGRATION: A Case Study of Mollucans in The Netherlands*, tahun 2006 dengan judul penelitian *The Dynamic of Turkish Migration and Integration in The Netherlands*, tahun 2007 dengan judul penelitian *European Regionalism and The Political Economy of The Netherlands*. Di samping itu, Peneliti Eropa PSDR juga telah melakukan kajian terhadap dinamika masyarakat di Jerman, di antaranya adalah tahun 2006 dengan judul penelitian *European Transnational Corporations and Philippines Development*, tahun 2008 judul penelitiannya adalah *The German Model in Motion*, dan *Migration and Citizenship in Germany*.

Penelitian berjudul *European Regionalism and Political Economy of The Netherlands* adalah penelitian yang memandang Eropa sebagai suatu kesatuan kawasan sehingga kajiannya menyangkut persoalan dampak kebijakan UE terhadap negara-negara anggotanya, khususnya Belanda. Dampak ini antara lain berimbas di sektor ekonomi, khususnya dari segi investasi dan perdagangan. Penelitian ini menggambarkan adanya pengaruh positif perluasan UE terhadap segi perdagangan dan investasi ke negara-negara anggotanya karena nilai nominal kegiatan tersebut menjadi meningkat. Tidak mengherankan, sejumlah negara yang bergabung dengan UE semakin banyak. Negara-negara bekas sekutu Uni Soviet di kawasan Balkan, seperti Polandia, Hungaria, Rumania, Ceko, dan Bulgaria, bergabung dengan UE. Mungkin hanya Yugoslavia yang tidak bergabung dengan UE karena posisi politiknya berlawanan dengan UE maupun AS. Sementara itu, Yugoslavia lebih memilih bersekutu dengan Rusia sebagai pewaris Uni Soviet.

ISU GLOBALISASI POLITIK: Demokratisasi di Eropa Tengah dan Timur

Glasnost dan *Perestroika* merupakan bola api yang liar. Terpilihnya Presiden Michael Gorbachev membawa perubahan, tidak hanya di Rusia, namun di ETT. Seperti diketahui, ETT merupakan daerah pengaruh Rusia selama berlangsungnya Perang Dingin. Rusia menjadikan beberapa negara di wilayah ini seperti Polandia, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Ceko, dan Slovak penganut paham Komunisme. Walaupun demikian, Presiden Gorbachev melakukan program *Glasnot* (keterbukaan) dan *Perestroika* (restrukturisasi) di Rusia. Program ini membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan, gaung dari pembaruan ini sampai ke kawasan ETT yang merupakan sekutu Rusia. Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan sosial politik dan ekonomi di kawasan ini.

Fenomena ini dipahami sebagai gelombang demokratisasi. Satu demi satu pemerintahan komunis di ETT tumbang karena mendapat tekanan dari rakyatnya yang menuntut pemerintahan demokratis. Di samping itu, Gorbachev juga mengisyaratkan perlu menerima aspirasi rakyat yang berkembang di ETT.

Peralihan dari tatanan komunis kepada demokrasi secara umum tidak terlalu bergejolak, kecuali di Rumania. Pemerintah komunis yang berkuasa sendiri yang melakukan pembenahan intenal untuk menuju tatanan demokrasi. Di lain pihak, rakyat menerima transformasi politik ini dengan baik pula sehingga tidak perlu jatuh korban yang terlampau banyak dalam transisi politik ini. Transisi politik ini umumnya terjadi antara tahun 1989 sampai dengan 1991.

Dalam kurun waktu waktu 3 tahun, masyarakat yang tinggal di ETT telah merespons isu demokratisasi. Hal ini tidak terlepas dari aspek eksternal, yaitu Gorbachev memberi dukungan politik terhadap gelombang demokratisasi di wilayah ini. *Glasnost* dan *Perestroika* juga disebarkan ke kawasan ETT sebagai upaya untuk mendorong gelombang demokratisasi. Berbagai negara ETT yang berada di bawah hegemoni Rusia mau tidak mau mengikuti garis kebijakan tersebut. Sementara aspek internalnya adalah perilaku politik masyarakat di ETT yang mendukung kebijakan transformasi politik tersebut secara realistis. Terkesan terjadi suatu kesepakatan politik antara penguasa dan rakyat di ETT sehingga transisi politik dari

tatanan otoriter menuju tatanan demokratis berjalan dengan aman.

Meskipun demikian, gelombang demokratisasi bukan berjalan tanpa masalah. Demokratisasi juga memiliki kendala-kendala yang menghambat demokratisasi itu sendiri. Di Rusia, ide pembaruan mendapat penolakan dari masyarakat pendukung Komunisme. Mereka adalah ultranasionalis yang lebih menyukai tatanan Komunisme atau Marxisme-Leninisme tetap menjadi sistem politik di negaranya. Kekuatan masyarakat Rusia yang berpaham demikian jumlahnya cukup signifikan dan memiliki wakil di *Duma*, yaitu Parlemen Rusia. Salah satu peristiwa yang cukup bersejarah adalah ketika Gorbachev diculik dan dibawa keluar kota Moscow oleh sejumlah orang. Hal ini pasti ada kaitannya dengan kekuatan atau para pihak yang anti terhadap kebijakan-kebijakan politiknya atau pihak-pihak yang mengincar posisinya selaku pemimpin negara adidaya itu. Sampai akhirnya, Boris Yeltsin menemukan dirinya dan mengamankan atau membawanya kembali ke Moscow. Akhirnya, Yeltsin menggantikan dirinya dan meneruskan upaya pembaruan di negara itu.

Kebijakan Presiden Gorbachev membawa dampak signifikan dalam kehidupan politik Uni Soviet. Uni Soviet berubah menjadi sejumlah negara berdaulat. Walaupun demikian, Rusia menjadi pewaris utama negara adidaya itu. Negara-negara baru muncul seiring dengan bubarnya Uni Soviet, misalnya Georgia, Ukraina, dan sejumlah negara Asia Tengah yang dahulu juga di bawah Soviet seperti Kazakstan, Usbekistan, dan Tajikistan. Pola hubungan sesama bekas uni Soviet ini sebagian bersifat konflik karena perebutan wilayah. Sementara hubungan Rusia dengan bekas Uni Soviet sebagian juga bersifat konflik karena Rusia mendukung sejumlah gerakan-gerakan antipemerintah di berbagai negara bekas Uni Soviet itu. Di samping itu, hal ini juga dipicu oleh masalah-masalah ekonomi.

Sebaliknya, demokratisasi di ETT dihadapkan pada kekuatan lama yang berganti “baju baru.” Seperti diketahui, di ETT terjadi transformasi politik yang dilakukan oleh penguasa komunis sendiri. Partai Komunis yang berkuasa di ETT karena terjadi transformasi menyebut dirinya menjadi Partai Sosialis. Mereka memang mendukung terjadinya perubahan tatanan politik itu meskipun sikap-sikap konservatifnya belum sama sekali hilang. Akibatnya, sering terjadi konflik antara kekuatan

konservatif yang terdiri dari sisa-sisa Partai Komunis melawan kekuatan demokratis yang mencerminkan gerakan pembaruan.

Sisa-sisa kekuatan komunis masih eksis dalam kehidupan politik di ETT. Dalam suatu pemilu mereka memilih dan menyalurkan aspirasi kepada wakil-wakilnya. Dalam hal ini, mereka memiliki suara dan kekuatan politik walaupun kekuatannya tidak sekuat saat sebelumnya. Ketika kekuatan politik pro-demokrasi gagal dalam pembangunan, keberadaan kekuatan komunis bukan mustahil menjadi menguat dan bisa mencuri perhatian masyarakat di ETT. Walaupun demikian, hal ini sebenarnya dipandang positif sejauh program-program mereka mencerminkan perubahan dan semangat demokrasi. Keberadaan sisa-sisa kekuatan komunis bisa menjadi penyeimbang kekuatan pro-demokrasi. Akibatnya, di antara kedua kekuatan terjadi saling kontrol dan koreksi yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan satu sama lain.

Transformasi di Bulgaria. Transformasi di Bulgaria tidak terlepas dari sikap elit politik komunis yang berkuasa. Gelombang demokratisasi telah mendorong Tudor Zhivkov, seorang pemimpin Bulgaria, memberi ruang kepada gelombang demokratisasi setelah berkuasa secara otoriter lebih dari 3

dekade. Zhivkov menolerir demonstrasi di Sofia, ibu kota Bulgaria. Zhivkov sebagai Sekjen Partai Komunis dan Ketua Dewan Negara mendominasi struktur politik di Bulgaria, namun akhirnya 10 November 1989 dia turun dari tampuk kepemimpinan di Bulgaria. Zhivkov dipandang sudah tidak lagi cocok dengan tuntutan rakyat Bulgaria yang menginginkan pemimpin yang lebih demokratis. Zhivkov menolak upaya demokratisasi yang tidak sejalan dengan sosialisme sehingga menimbulkan ketidaksukaan rakyat kepada dirinya.

Selanjutnya, kepemimpinan Zhivkov dilanjutkan oleh Petur Mladenov. Mladenov sebelumnya adalah Menteri Luar Negeri Bulgaria. Mladenov adalah pemimpin komunis yang mencoba menampung semangat demokratisasi rakyat Bulgaria. Mladenov antara lain membubarkan Polisi Rahasia Bulgaria pada 7 Februari 1990. Polisi Rahasia ini sering berhadapan dengan aktivis atau para pemimpin demonstran. Kebijakan Mladenov mendapat dukungan rakyat Bulgaria, bahkan juga mendapat pujian dari masyarakat internasional, khususnya masyarakat Eropa. Langkah yang ditempuh Mladenov dengan membubarkan Polisi Rahasia ini dipandang sejalan dengan semangat demokratisasi yang melanda Eropa.

Meskipun demikian, Mladenov terjebak pada tindakan yang tidak demokratis. Dia membubarkan demonstrasi dengan paksa, yaitu menggunakan Tank pada tanggal 18 Desember 1989. Hal ini direkam oleh video dan dijadikan barang bukti bahwa Mladenov tidak konsisten dengan semangat demokratisasi. Karena terbukti bersalah, Mladenov akhirnya mengundurkan diri pada 1 Agustus 1990 dan dia digantikan oleh Zheliu Zhelev, pemimpin pertama di Bulgaria yang berasal bukan dari kalangan komunis. Dia adalah pemimpin the Union of Democratic Force (UDF) yang menjadi salah satu kekuatan penting dalam transformasi di Bulgaria. *Grand National Assembly* mengangkat Zhelev menjadi Presiden Bulgaria, namun Wakil Presiden ialah Atanas Semerdjiev, seorang Jenderal dan tokoh dari kalangan komunis. Nampaknya, konfigurasi politik yang dibangun di era transisi adalah keseimbangan antara kekuatan pro-demokrasi dan komunis.

Selanjutnya, dari sisi ekonomi hal penting dari transformasi di Bulgaria adalah kebijakan privatisasi. Privatisasi di Bulgaria bisa dikatakan berjalan lambat. Kondisi ini terkait dengan sikap Partai Sosialis Bulgaria yang bersikap konservatif dalam soal

kebijakan privatisasi tersebut. Konsekuensinya, hal ini kurang menarik minat para investor dalam dan luar negeri, lalu akibat lebih lanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Kebijakan privatisasi di Bulgaria mengarah kepada 1) Arah kebijakan privatisasi untuk perbaikan sektor pertanian, industri kecil, dan perumahan; 2) Sasaran privatisasi usaha kecil meliputi mini market dan pompa bensin; 3) Konsep yang dipakai dalam privatisasi adalah *one by one privatisation*. Privatisasi dilakukan dari perusahaan kecil, menengah, baru perusahaan besar (Schwartz, 1995: 32). Di lain pihak, investor biasanya lebih tertarik kepada perusahaan-perusahaan menengah dan besar.

Program privatisasi di Bulgaria dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala-kendala itu adalah sebagai berikut: 1) Masih kuatnya pengaruh komunis atau kendala ideologis. Pada Pemilu 1990 Bulgaria Sosialis Party (BSP) mendapat 47%, the Union Democratic Force (UDF) mendapat 36,20%, dan sisanya dibagi sejumlah partai (Bell, 1989:20). Dengan demikian, kekuatan kubu sosialis yang merupakan reinkarnasi kekuatan komunis masih kuat di parlemen. Konfigurasi politik ini menjadi kendala dalam program privatisasi karena sikap

konservatif BSP; 2) Produk hukum yang tidak kondusif untuk terlaksananya privatisasi atau disebut juga kendala struktural. Produk hukum yang mengatur soal privatisasi adalah dekret No. 56 Tahun 1990 yang membatasi modal asing dalam perbankan di Bulgaria. Modal asing maksimal hanya boleh memiliki saham 50% di perbankan Bulgaria. Undang-undang Privatisasi Tahun 2003 (PPPC Act) juga hampir sama semangatnya dengan dekret tersebut, yaitu penjualan saham di suatu perusahaan tidak boleh melebihi angka 50%. Dengan demikian, Pemerintah Bulgaria tidak ingin kehilangan kontrol atas perusahaan-perusahaan di sana sehingga terjadi pembatasan atas peran swasta di berbagai perusahaan. Hal ini membuat investor kurang berminat menanamkan modalnya di sektor perbankan.

Jebolnya Tembok Berlin. Sementara itu, Tembok Berlin menjadi sasaran masyarakat pejuang demokrasi di Eropa. Tembok Berlin dipandang sebagai simbol dari Komunisme. Dengan demikian, Tembok Berlin tidak disukai oleh rakyat Eropa, khususnya rakyat Jerman sehingga mereka terpanggil untuk menjebolnya. Tembok itu mengingatkan masyarakat kepada kekejaman rezim komunis. Di samping itu, Tembok ini

dinilai tidak relevan dengan semangat demokratisasi yang melanda Eropa.

Dari segi historis, Tembok Berlin dibangun tahun 1948 dan pembangunan ini dipandang sebagai awal terbelahnya Eropa secara ideologi. Pembangunan ini boleh dikatakan tanda dimulainya Perang Dingin di Eropa kemudian menjalar di berbagai kawasan di dunia, perang antara komunisme melawan liberalisme. Rusia merasa berkepentingan menguasai Eropa Timur. Negara ini beralasan negara ini tidak ingin kembali mendapat serangan dari Jerman di kemudian hari karena sudah mendapat serangan Jerman sebanyak 2 kali. Kebijakan Rusia ini sebenarnya bertentangan dengan Konferensi Yalta 1945 yang menjanjikan masa depan kawasan ETT akan ditentukan oleh Pemilu yang demokratis. Namun kenyataannya, Jerman Timur dan negara ETT lainnya dijadikan daerah penyangga dari ekspansi Jerman.

Pembangunan Tembok Berlin bukan hanya pembagian atas wilayah Jerman, tetapi hal ini sebagai fenomena semakin menguatnya konflik antara AS dan Rusia. Ketegangan politik antara AS dan Rusia sudah mulai terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Pemimpin kedua negara saling

melontarkan pernyataan yang bernada permusuhan karena adanya saling tidak percaya di antara *The Big Three* (Rusia, AS, dan Inggris). Misalnya saja, Stalin menyatakan bahwa dunia tidak akan damai sejauh tatanan ekonomi internasional dikuasai oleh kapitalisme. Pernyataan ini memprovokasi pihak pemimpin AS. Sebaliknya, Presiden Truman meyakini bahwa demokrasi dan kebebasan akan terancam dengan semakin meluasnya ekspansi komunisme. Pembangunan Tembok Berlin ini juga mencerminkan blokade Rusia terhadap masyarakat yang tinggal di Jerman Barat yang merupakan negara kalah perang dan menjadi daerah pengaruh AS dan sekutunya. Wajar saja AS dan sekutunya mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menembus blokade atau semacam embargo ekonomi kepada masyarakat di kawasan itu. AS dan sekutunya melakukan suplai kebutuhan pokok untuk masyarakat Jerman Barat. Upaya penerobosan blokade ini dilakukan dengan pengerahan pesawat udara untuk menerjunkan berbagai kebutuhan pokok dan obat-obatan di wilayah Jerman Barat.

Di lain pihak, Jerman Barat berada di bawah pengaruh AS. Jerman Barat menerapkan tatanan sosial-politik prinsip-prinsip demokrasi liberal. Jerman Barat menetapkan Bonn sebagai ibu

kota atau pusat pemerintahannya. Dalam Perang Dingin, Jerman Barat merupakan bagian penting dari strategi militer AS. Di negara ini digelar sejumlah peluru kendali berhulu ledak nuklir. Jerman Barat merupakan bagian penting dari *Containment Policy* di Eropa yang tujuannya adalah untuk mencegah meluasnya ekspansi komunisme. Dalam rangka melaksanakan *Containment Policy* ini, AS dan sekutunya mengembangkan NATO dan *Marshall Plan*. NATO adalah aliansi militer AS dan negara-negara Eropa Barat, sedangkan *Marshall Plan* adalah dukungan ekonomi AS kepada Eropa Barat yang hancur karena Perang Dunia ke-2.

Jebolnya tembok Berlin pada tahun 1989 merupakan simbol tumbangya komunisme. Masyarakat di Jerman Timur maupun Jerman Barat menjebol Tembok Berlin sebagai upaya memerangi simbol-simbol komunisme di Jerman. Tembok Berlin dibangun atas keinginan Rusia yang menjadi simbol pemimpin komunis dunia. Di samping itu, masyarakat Jerman Barat juga ingin kembali bersatu dengan masyarakat Jerman Timur karena selama ini mereka dipisahkan oleh Tembok Berlin. Di era Perang Dingin Tembok Berlin dijaga dengan ketat oleh pasukan Jerman Timur. Hal ini untuk mencegah

menyeberangnya warga Jerman Timur ke Jerman Barat karena kebutuhan ekonomi.

Dalam hal ini, pihak yang paling berkepentingan adalah warga Jerman Timur. Masyarakat di Jerman Timur kehilangan hak-haknya sebagai individu selama di bawah rezim komunis. Mereka memandang pendobrakan Tembok Berlin sebagai peluang untuk mengembalikan hak-hak individu, baik hak politik maupun hak ekonomi. Mencari kehidupan yang lebih baik di Jerman Barat menjadi impian dari masyarakat Jerman Timur. Bantuan Pemerintah Jerman Barat untuk menata kehidupan mereka juga merupakan suatu dambaan. Warga Jerman Timur tentu juga berharap ingin hidup sejahtera seperti saudara-saudaranya yang tinggal di Jerman Barat. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat berbeda antara kedua negara menjadi alasan penting untuk bergabung dengan Jerman Barat.

Masyarakat Eropa meyakini jebolnya Tembok Berlin sebagai kemenangan demokrasi atas tirani. Dalam tatanan komunis, individu tidak memiliki hak-hak politik secara bebas untuk disampaikan kepada pemerintah yang berkuasa. Rakyat tidak bisa mengartikulasikan kepentingan politiknya. Di samping itu,

individu-individu juga tidak memiliki hak untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang ekonomi karena kewenangan pengelolaan sektor ekonomi, baik barang maupun jasa berada di tangan pemerintah. Setelah Tembok Berlin jebol, masyarakat Berlin bebas menyampaikan aspirasi politiknya karena tatanan sosial-politiknya menjadi demokrasi. Selanjutnya, kendali sosial ekonomi berada di tangan Jerman Barat sehingga individu-individu dijamin untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan usahanya di Berlin. Pendeknya, sesudah jebolnya Tembok itu masyarakat Jerman Timur hidup dalam tatanan yang demokratis atau hidup dalam suasana bebas dari ketakutan.

PENUTUP

Studi wilayah Eropa adalah suatu kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di wilayah Eropa secara keseluruhan dan kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di negara-negara Eropa. Ketika suatu kajian dilakukan terhadap dinamika sosial di Eropa secara keseluruhan, objek materialnya atau objek telaahnya adalah persoalan-persoalan terkait dengan kebijakan

Uni Eropa (UE). Sementara itu, objek material dari kajian persoalan sosial di suatu negara Eropa adalah persoalan-persoalan di masyarakat dan kebijakan dari pemerintah negara tersebut. Kajian ini lebih sempit sifatnya karena diarahkan kepada persoalan-persoalan sosial yang timbul di negara Eropa saja.

Bidang Perkembangan Eropa PSDR-LIPI ke depan diharapkan akan mengembangkan beberapa kelompok kerja dari para penelitinya. Hal ini adalah untuk merespons minat para peneliti sendiri dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Kelompok kerja penelitian itu meliputi sebagai berikut: 1) Kelompok Kerja Eropa Barat; 2) Kelompok Kerja Eropa Timur; dan 3) Kelompok Kerja UE. Penelitian yang sedang berjalan saat ini, Kelompok Kerja Eropa Barat, sedang meneliti permasalahan pekerja migran di Belanda. Kelompok Kerja Eropa Timur sedang mengkaji permasalahan lingkungan hidup di Ceko.

Masyarakat Eropa menyikapi isu globalisasi politik atau isu demokratisasi dengan cepat dan cukup berhasil. ETT yang tadinya berpaham komunis berubah menjadi demokratis. *Glasnost dan Perestroika* menjadi inspirasi dari demokratisasi di ETT. Terpilihnya Presiden Michael Gorbachev membawa

perubahan tidak hanya di Rusia, namun juga di ETT. Seperti diketahui, ETT merupakan daerah pengaruh Rusia selama berlangsung Perang Dingin. Rusia menjadikan beberapa negara di wilayah ini seperti Polandia, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Ceko, dan Slovak sebagai penganut paham Komunisme. Walaupun demikian, Presiden Gorbachev melakukan program *Glasnot* (keterbukaan) dan *Perestroika* (restrukturisasi) di Rusia. Program ini membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan, gaung dari pembaruan atau demokratisasi ini sampai ke kawasan ETT yang merupakan sekutu Rusia. Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan sosial politik dan ekonomi di kawasan ini dari komunis menjadi demokrasi. Suatu catatan, Uni Soviet atau Rusia yang mengomunikasikan ETT, namun Rusia juga yang mendemokrasikannya. Meskipun demikian, peran rakyat di kawasan ini juga besar dalam demokratisasi itu.

Demokratisasi di EET menjadi pembanding dari proses reformasi di Indonesia. Transformasi di ETT hampir sama dengan reformasi di Indonesia. Kendati demikian, penegakan hukum di Bulgaria bagi mantan penguasa komunis yang bersalah sungguh-sungguh ditegakkan. Misalnya saja Tudor

Zhikov dipenjara selama 9 tahun. Padahal, Zhikov mantan orang nomor 1 di negaranya, namun tidak ada istilah diampuni atau dimaafkan. Keputusan pengadilan harus ditegakkan. Kelemahan dan kelebihan di ETT menjadi bahan pelajaran yang berharga untuk menyempurnakan reformasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfian. 1990. *Permasalahan Studi Wilayah Internasional*. Lembaga Riset Kebudayaan Nasional-LIPI.
- Bell, John D. 1989. "Bulgaria" dalam Stephen White. *Handbook of Reconstruction in Earstern Europe and the Soviet Union*. London: Longman.
- Hodson, Joel. 1969. "Globalization and Nationalism in the United States: A Historical Perspectives". In Leo Suryadinata (Ed). *Nationalism and Globalization*. Singapore: ISEAS.
- Schwartz, Gerd. 1995. "Privatization in Eastern Europe," in Paul Cook *et al.* (Ed.) *Privatization Policy and Performance*. Manchester: Prentice Hall.
- Sumaatmaja, Nursid. 1980. *Perspektif Studi Sosial*. Aluni: Bandung.
- The European Union and Indonesia: Building Closer Relations*, Delegation of the European Commission, Jakarta.

Globalization of Culture: Modern Society's Control over Nature and Concerns about Ecological Dangers: From Being Marginalized to Increasing Mainstream Issue in South-East Asia?

Drs. Dundin Zainuddin, M.A.

Dari COP-13 Konferensi Bali Desember 2007 lahir kesepakatan tentang 'peta alur jalan' (roadmap) menuju Denmark (2009) sebagai tahun sasaran merampungkan protokol baru pasca-2010 dengan pola pembangunan abad ke-21 yang berkadar rendah karbon sekaligus mengurangi kemiskinan, menghapus ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial menuju dunia global yang lebih adil antara negara maju dan negara berkembang (Emil Salim, 2010: 21).

It might be true to say that globalization is still being intensively discussed. In France, the word is mondialisation. In Spain and Latin America, it is globalization, while the Germans say globalisierung. The global spread of the term is evidence of its very developments. Almost every one especially politician, academia or businessperson talks about it. Even its sudden popularity, it is not be surprised that the meaning of the notion isn't always clear. Commonly, it has

something to do with the thesis that we all live in one world, or the increasing interconnectedness of the world as a complex system (Turner, 2010: 1).

Different thinkers have taken almost completely opposite views about globalization in debates that have sprung up over the past few years”, so says Giddens in an interview. To him, there are two opposite camps, namely skeptics and radical. According to the sceptics, all the talk about globalization is only ‘that - just talk’. The global economy isn't especially different from that which existed at previous periods. The world carries on much the same as it has done for several decades. Most countries only gain a small amount of their income from external trade. To skeptics, a good deal of economic exchange is between regions, rather than being truly world-wide. The countries of the European Union, for example, mostly trade among themselves. The same is true of the other main trading blocs, such as those of the Asia Pacific or North America. According to the sceptics, it is an ideology put about by free-marketers who wish to dismantle welfare systems and cut back on state expenditures. What has happened is at most a reversion to how the world was a century ago. In the late 19th Century there was already an open global economy, with a great deal of trade, including trade in currencies.

Meanwhile, the radicals argue that not only is globalization very real, but that its consequences can be

observed everywhere. The global marketplace is much more developed than even two or three decades ago, and is indifferent to national borders. Nations have lost most of the sovereignty they once had, and politicians have lost most of their capability to influence events. The era of the 'independence' nation state is over. The American sociologist, Daniel Bell, states that the nation becomes too small to solve the big problems, but also too large to solve the small ones.

It has to be acknowledged that the level of world trade today is much higher than it ever was before, and involves a much wider range of goods and services. But the biggest difference is in the level of finance and capital flows. In the new global electronic economy, fund managers, banks, corporations, as well as millions of individual investors, can transfer vast amounts of capital from one side of the world to another at the click of a mouse.

However, the phenomenon is not solely in economic terms. Globalization is political, technological, and cultural, as well as economic. Traditional family systems, for instance, are becoming transformed in many parts of the world, particularly as women stake claim to greater equality. Globalization is also the reason for the revival of local cultural identities in different parts of the world. The changes are being propelled by a range of factors, some structural, others more specific and historical. Economic influences are certainly among the driving forces,

especially the global financial system. They have been shaped by technology, and cultural diffusion, and by the governments' decisions to liberalize and deregulate their national economies. This process has been influenced by developments in systems of communication, dating back to the late 1960's.

The Soviet and the East European regimes were unable to prevent the reception of western radio and TV broadcasts. Television played a direct role in the 1989 revolutions, which have rightly been called the first "television revolutions". Street protests taking place in one country were watched by the audiences in others.

Globalization, to many living outside Europe and North America, so says Giddens, looks uncomfortably similar to Westernization—or, perhaps, Americanization since the US is now the sole superpower, with a dominant economic, cultural, and military position in the global order. Many of the most visible cultural expressions of globalization are American: Coca-Cola and McDonald's. Globalization, indeed creates a world of winners and losers, a few on the fast track to prosperity, the majority condemned to a life of misery and despair.

Along with expanding inequality, ecological risk is the most serious problem facing world society including south-east Asian society. This tendency should be seen as a result of

globalizing intellectual development as Globalization of Culture²⁰ that will be explored as follows.

Globalizing Intellectual Development: From Theocentric to Anthropocentric Approach

Critical discussion of the theocentric approach and its relation to modernization can be traced back to Hegel's proposition on the issue (Hegel, 1895, 1952). His attention of liberating all spirit and throwing away all superstitions to gain an ultimate idea that embraces all ideas was developed along with his philosophical discussion on religious consciousness, particularly Christianity. To him, religion is the appearance of the Absolute Independence. This Absolute Independence depends on the absolute content of religion, namely the Absolute Consciousness with which individuals build relationship. This notion is to emphasize the importance of 'open mindedness'.

Hegel then developed universal pragmatic based on divinity, theology, knowledge of God's action in himself and the world of nature, human beings' inner world, social, and

²⁰ As stated by E.B. Taylor "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and acquired by man as member of society" (cited in Notosusanto, 1984: 3).

cultural world (1895: 14). In Hegelian proposition, art, religion, and the philosophy of the natural, personal and social world are first of all the work of God's absolute spirit and only then also of human being spirit. To him, no action of human, nature, and social world is possible without God as its base. However, when he analyzed the relationship between religion, state, and church, he found internal contradiction between the latter two over the church's claim as the kingdom of God on earth. To him, it is the state that is basically the reality of God's kingdom, while the church is subordinated because the church is reality-less entity. This is to protect the purity of religious consciousness from fanaticism (Hegel, 1952: 171–174). He also proposed the sublimation of religion into philosophy (theological philosophy or philosophical theology) to enable to enter into discourse with philosophy and social science, with a transcendental pragmatic. To him, only philosophy can reconcile pure and real consciousness, religious and secular, faith and reason, redemption and emancipation, revelation and enlightenment and human and his/her world (Hegel, 1952: 147–148).

This Hegelian philosophical discourse of theocentric approach and its contribution to the evolution toward modernity have become a controversial issue among his followers: between those who see the incompatibility of religion with modernity and those who seek for an explanation of the modernity from religion. The latter then formulated an anthropocentric approach.

This term means those values, goods and interests that promote human welfare to the near exclusion of competing nonhuman values, interest of goods. This is related to terms instrumentalism, meaning that the world is perceived as a resource valuable only as it promotes human good (Katz and Oechsli, 2003: 50).

Comte can be considered as the most influential thinker who established positivism as the branch in the philosophy of science. He conceived intellectual capacities into three stages: theological, metaphysical, and positive science. Theological stage, the universe is merely conceived of as determined by the agency of spiritual being. This stage is then replaced by metaphysical stage that paves the way for the advent of science. In this stage, the positive philosophy that rationalism comes to its maturity (Giddens, 1982).

Comte's evolutionary theory influences theories of development, particularly in the modernization school. This school can be summarized as follows. Firstly, it is assumed that social change is unilinear; that human society is predetermined to move along one direction from a primitive to an advance state. Secondly, it views that movement toward an advanced state is good because it represents progress humanity and civilization. Thirdly, the rate of social change is evolutionary that is slow, gradual, and piecemeal (Comte, 1964: 31). Thus, the school represents the idea that there is a continuing centrality of the West in initiating and developing modern society. This theory classifies different stages of modernization

through which all society will go: societies move from primitive single, undifferentiated traditional state to an advanced complex industrial, differentiated modern stage. Practically, this process of globalization is westernization because American (European) social scientists viewed the US and European countries with unchallenged economic prosperity and democratic stability as the model for less developed countries to follow (Tenbruck, 1990: 199–210).

Returning to the anthropocentric approach, the argument for the primacy of (an anthropocentric) rationality over other world views such as religion gains its support from Marx. His philosophical works have become one of the most successful Enlightenment projects. He could no longer admit Hegelian's theocentric approach. Religion cannot be considered as an independent force that may shape equal social relations because it is merely a false consciousness created by the dominant class to maintain its domination over the subordinated class. To him, only rationality based on the Enlightenment is compatible with modernity. And true science, according to Marx, must be based on materialist science which denies the transcendentalism (Marx, 1976: 35–36).

Marx's argument of the primacy of rationality in mastering nature and his critique of Hegel's theocentric approach has become one of the fundamental tenets of Marxism and Critical theory based on historical materialism. This is especially true in the development of Habermas' critical theory. He has tried to reformulate the 19th century and the

Enlightenment heritage. He undertakes critical defense of modernity to realize its potential to achieve just, equal, and prosperous society. His writings are influenced by the three great social theorists: Marx, Weber, and Durkheim. From Marx, he reformulates and develops the idea of the goal of emancipation. Habermas also mentions and analyses the problem of disenchantment and rationalization from Weber. This is transformed into a new phrase: colonization of life world. He also receives and develops.

He proposes three basic cognitive interests that guide the creation of knowledge, namely the technical (mode of inquiry is empirical-analytic), the practical (the mode of inquiry is interpretative understanding), and the emancipatory level to secure the autonomy of the individual through recognition of unnecessary constraints such as distorted communication (1973: 311). To him, the 'truth' can only be achieved in a situation of free and open discourses, an ideal speech situation motivated by a goal of unconstrained agreement. His communicative action (CA) is actually intended to reach mutual understanding among the participants that can be achieved if the validity claims of the interlocutors' are fulfilled. The validity claim must involve three elements: comprehensibility, truth, and rightness. The CA can be fulfilled only if "the hearer not only understands the meaning of the sentence uttered, but also actually enters into relationship intended by speaker. Every participant should be able to defend their truth claims according to normative legitimacy they have.

Finally, all participants have to be able to assume responsibility and to provide justification (Habermas, 1987: 126).

However, his strong commitment to the Enlightenment project has led Habermas to consider the new social movement such as environmental movements as defensive, neo-romantic, and resistant. To him, these movement can be attained, not through the destruction of modernity, but through the preservation of its positive achievements namely the rasionalization of lifeworld²¹ (lebenswelt) (1987: 392–394).

Obviously, Habermas evaluated modern society having been detached from mythical and religious influences and used rationality as its normative basis as the ideal. Only in this society has the decentring of cognition taken place that lead to the capacity of differentiation of social institution and to refelective criticism geared to purposive rational-action characterize modernity.

New Globalizing Intellectual Concern: Ecocentric Approach

An ecocentric (earth-centered) conception recognized humans as part of nature. This is based on an ecologically informed philosophy or internal relations that refers not only to

²¹ This concept refers to the implicit shared understanding presupposed by any speech act. This is basically formed from more or less diffuse, always unproblematic, background conviction that serves as a source of situation definition which are presupposed by participant as unproblematic.

respect of human-non human relations, but also respect of inter-human relations in every aspect of life. The world is viewed as an intrinsically dynamic, interconnected web of relation in which there are no absolute dividing lines between living systems and non living system or between humankind and the rest of nature. This is to liberate the nonhuman world from the status of human resource or human product (McLaughlin, 1995: 301; Eckersly, 2000: 749). The interesting point of this philosophy is that this ecological model of internal relation is located in the context of a broader and more encompassing pattern of layered interrelationships that extend beyond personal and societal relations to include relations with the rest of the biotic community.

Consequently, ecocentrism rejects the idea of a hierarchical chain of being which holds that nature and plants or the use of animals, and animals were made for the sake of human. Conversely, it sees that the different members of nonhuman communities are appreciated as important in their own mode of being. Nature must be appreciated as an end-in-itself, not as a factor of human self realization (Eckersly, 2000: 752–758).

It is argued (Eckersly, 2000:7–59) that the purpose of declaring the absence of any absolute dividing line is to show the inconsistency of anthropocentric ethical and political theory that justifies the exclusive moral accountability of humankind on the basis of our superiority and uniqueness to the non human world. The reason for that is because human

chauvinism fails to acknowledge the particular forms of excellence of other life-forms, such as dolphins which have stronger sonar capabilities than human. It is again argued that their approach such as the model of internal relations which means that all organisms are profoundly interrelated with their environment is more consistent with modern science than the anthropocentric one which conceives humans as separate from the rest of nature.

This approach can be illustrated by an environmental philosophy known as “transpersonal ecology” which is concerned that this world sense of self extend beyond one’s personal sense of self to include all being. This proceeds from a particular world view that we are part of an unfolding “tree of life” to psychological identification with all phenomena. The purpose of this respectful orientation toward the world is to seek the fundamental nature of ecological and social reality which provides a ground for an ecocentric approach. This does not mean that nature is considered an ultimately benevolent entity, but that it can still be used as far as its interest to exist and grow are taken into full consideration.

Moving beyond anthropocentrism has also been a focus of Karz and Oecslis’ writings (2003). They reject an anthropocentric and instrumental system of normative ethics on the ground that the preservation of the environment cannot be based on the promotion of human interests or goods. Their argument is exemplified by the dilemma of Third World Development policy such as the controversy over the

preservation of the Amazon rain forest. The restrictive framework of anthropocentric interests such as considerations of both justice and utility has precluded a solution to the problem.

The issue of justice in preservation policy is crucial. If environmentalists ask the Third World to preserve its environment, for instance, decision makers in the Third World can demand justice because that policy unfairly damages the human interest of the local population. It is argued (Katz and Oecshli, 2003: 57) there are only two possible alternatives to justify the policy without a loss of equity, namely the Industrialized World must pay for the benefit gained from preservation, or the anthropocentric or instrumental rationality must be rejected. The first one is an empirical issue which seems not to be optimistic, while the second one requires a shift in philosophical world view.

Ecocentric perspectives demand that an obligation directed toward nature as an end in its own interest makes a question of justice for humans irrelevant because humankind also has moral obligations to nature in itself. This obligation is not for human benefit resulting from the policy of self preservation, but because preservation of nature has been an obligation. Shortly, the ecocentric framework may serve to simplify the decision.

Ecocentric protagonist also criticizes Habermas proposition²² i.e dualistic approach that deals with relation between humans. It is only in modern time that we have assumed the Cartesian mantle of ‘masters and possessors of nature’. It is argued (Ottoman, 1992: 92–935) that a will to control, whose legitimacy is based on our need to survive, is itself a threat to our survival. Therefore, ecological problem might remain in a Habermasian society because the intention to exploit and control nature will simply give rise to more technological fix solution that will perpetuate environmental problems. An objection to instrumental reason is based on the fact that human actually never fully understand all the relationships between themselves and the rest of nature. The Green revolution (as an example of how instrumental reason could alleviate world hunger) is now increasingly seen as creating ecological problems which in turn have accentuated world hunger (Eckersly, 2003: 756).

Habermas’ response to the above criticisms can be summarized briefly as follows. He says that his categories of thought represent epistemological endeavor (no an ethical statement). This is intended to produce knowledge which can

²² Habermas insists that environmental problems must necessarily be solved by the application of instrumental reason because it is the only kind of reason that produces the desired result. Habermas’ notion that nature can only be approached through science and technology in instrumental terms considered as part of the cause (not the solution) of the ecological crisis.

provide efficacious result from the perspective of human interest in material reproduction as well as survival. To him, although moralization of our dealing with nature can lead to perfect preservation of nature, such a step will cause a regression of the progressive outcome of the Enlightenment (Habermas, 1982: 241, 242).

Habermas also rejects the theoretical access to ‘nature-in-itself’(natura naturan) on the grounds that this postulate can not be linked in an unmediated way to the results of empirical research as far as the research has to fulfill the logical investigation of the objectivating. It seems that this argument can be traced back to Piaget’s thought about the structure of decentred understanding of the world which is determinative for the modern period.

Reflection

It seems that the ecocentric approach is the most promising way to preserve nature and its diversity. However, it is unrealistic to expect that this approach can be applied within the next five or ten years for the reason that development in the interest of human being is still urgently needed. This is especially true in the case of South-East Asian countries in which industrialization has been the main priority of development to increase employment opportunities, socio-economic conditions, and the welfare of their citizens.

Development theorizing in almost south-east Asian countries has its root in a long standing tradition of Western

reflection on the structure and the evaluation of modern Western societies. The modernization theory as the most popular perspective, for example, has viewed the total transformation of South-East Asian countries to be inescapable outcome of successful diffusion of the western socio-economic/technological complex. Therefore, a reorganization of their compatibility with the diffused liberal western socio-economic/technological complex may facilitate the very process of the diffusion. This ethnocentric assumption of diffusion has been made and continues to be made by modernization policy makers such as World Bank, IMF, U.N organization and those employed by western governments. The list features below, for instance, has become indicators of social, political, and cultural development. This feature has been promoted as 'condition' for economic development. Furthermore, these indicators have certain consequences for policy making. World Bank loan, for instance, are tied to the pursuit of monetary policies that favor "free enterprise" and the emergence of a bourgeois capitalist class.

Table 1. Indicators of Development

<ul style="list-style-type: none">- Degree of Urbanization- Literacy Rates and Vocational Training- Newspaper Circulation- Political Democracy (measured by the existence of multi-party system and the regular transfer through secret ballot election)- Free Enterprise- Secularization (institutionalization of rationality as dominant behavioral norm)- Degree of Social Mobility- Occupation Differentiation- Proliferation of voluntary associations including, for example, trade union- Nuclear Family- Independent Judiciaries
--

Source: World Development, vol.3, p.3, May, 1990.

This modernization theory has had quite an influential impact on development planning and policies in South-East Asian. This impact cannot be underestimated, especially when we observe that even recently, governments are still trying to implement it. Its appeal lies in the fact that this theory appears

to give a 'concrete' solution for economic development though over the years, criticism has been mounting against this theory offered by the Wallerstein's world system and dependency theory.

There is interesting development in South-East Asian, including Indonesia, development has been monitored by world institutions to be more aware of ecological concern and to have to take into account three elements of natural resources degradation, namely soil erosion, oil depletions, and deforestation. This lead to the rise of so-called Sustainable Development concept that seems to signal recent social change that is "concern about ecological dangers has moved from being the province of a more or less marginalized minority to increasing mainstream legitimacy".

It is in the context to be more aware of ecological concerns; the declaration of the head of the state/government of ASEAN²³ on the occasion of the 16th ASEAN Summit should be appreciated.

²³Namely the Heads of State/Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of ASEAN.

They renew their commitments made in the ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 15th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 5th session of the Conference Parties serving as the Meeting of Parties (CMP) to the Kyoto Protocol (2009), the ASEAN Declaration on the 13th session of COP to the UNFCCC and the 3rd session of the CMP to the Kyoto Protocol (2007), and the ASEAN Declaration on Environmental Sustainability (2007);

They recognize that the Southeast Asian region is also vulnerable to climate change which will seriously affect most of aspects of livelihood and limit our development options for the future, including our efforts towards the achievement of the Millennium Development Goals; they also emphasize the importance of sustainable forest management in ASEAN, which will contribute significantly to the international efforts to promote environmental sustainability and to mitigate the effects of climate change;

They share a vision for an ASEAN Community resilient to climate change, and supporting our national and global efforts to combat climate change consistent with our common, but differentiated responsibilities and respective capabilities; Unilateral policies and measures as well as market-based mechanisms in addressing climate change will not negatively affect international trade as well as the sustainable economic and social development of developing countries, taking into

full account the specific needs and special situations of the least developed countries;

The declaration also urge developed countries to fulfill their obligations under the UNFCCC and to provide scaled-up, new and additional, adequate and predictable funding to the developing countries, taking into full account the specific needs and special situations of the least developed countries and those most affected by climate change which shall be provided with incentives to continue to develop on a low emission pathway; Other points of declaration are as follows.

- Encourage all developing countries to make active contributions to the global efforts through the development and implementation of Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) on a voluntary basis, in accordance with their different national circumstances, while welcoming adequate financial and technical support that is made available to them;
- Encourage South-South cooperation to support ASEAN Member States in addressing the impacts of climate change through technical cooperation and capacity building;
- Reaffirm that agreement on and effective implementation of Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)-plus mechanisms is critical for contributions by ASEAN

Members States to mitigate emissions, and offers major opportunities for enhancing biodiversity conservation and sustainable use of natural resources, as well as supporting the livelihood of local communities in a sustainable manner;

- Engage in cooperation in research and development and knowledge sharing, including on agricultural management and practices so as to enhance food production, agricultural productivity and water resources sustainability, while adapting to the adverse effects of climate change and mitigating greenhouse gas emissions from the sector, thus ensuring food security in the ASEAN region;
- Commit ourselves to promoting programmes for raising domestic awareness on climate change and to inculcate habits towards a low emissions society, including through enhancement of education on climate change;
- Incorporate mitigation and adaptation strategies into national development strategies and policies in line with sustainable development;
- Enhance ASEAN participation towards strengthening international cooperation/efforts to address climate change and assess its impacts on socio-economic development, health, environment and water resources, including activities on building adaptive capacities and supporting mitigation and adaptation actions;
- Encourage cooperation with other regional and sub-regional institutions such as, inter-alia, the Greater

Mekong Sub-region, and the Mekong River Commission (MRC), while welcoming the outcomes of the First Summit of the MRC in Thailand on 4- 5 April 2010, which were reflected in the “Declaration on Meeting the Needs, Striking the Balance: Towards the Sustainable Development of the Mekong River Basin” highlighting the sustainable use, management, and development of water and related resources.

- Collaborate on environmentally-sound technologies, towards low carbon and green economy;
- Consider the possibility of developing an ASEAN action plan to better understand and respond to climate change;
- Develop ASEAN climate change impact scenarios as the foundation to conduct an ASEAN report on climate change impact assessment so as to provide inputs to the Fifth Assessment Report (AR 5) of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2015, taking into account related initiatives in other multilateral fora;
- Strengthen ASEAN collaboration and cooperation with a view to enhancing regional awareness on environment, environmentally-sound technology and climate change towards better research, and education, on these matters in the region.

To conclude, it seems that there is a growing concern among government and society to preserve nature through

sustainable development and concerns on ecological dangers have been important issues in ASEAN countries. Therefore, practice of sustainable agriculture in ASEAN countries and lesson learned for other communities would be valuable to be investigated. However, modernization theories are also still applied widely by the ASEAN government. There have been positive gains, but this globalization of modernization has also resulted in growing employment, poverty, growing inequality, social unrest, the culture of violence, trafficking of people, and neo-colonization. Undoubtedly, these social phenomena need also to be investigated in the context of ASEAN countries.

Bibliography

- Comte, Auguste. 1964. "The Progress of Civilization through Three States". PP 14–19. In Amitai Etzionie and Eva Etzione eds. *Social Change*. New York: Basic Books.
- Eckersley, R. 2000. "Habermas and Green Political Thought" in *Theory and Society*, 19:739–776. The Netherland: Kluwer Academic Puslishers.
- Gall, Peter, 1990. "What Really Matter: Human Develoment". In *World Development*, vii, 3, 3 (May)
- Giddens, A. 1973. *The Class Structure of the Advanced Societies*. London: Hutchinson.
- 1982. *Profiles and Critiques in social Theory*. London Macmilan.

- Habermas, J. 1971. *Knowledge and Human Interests*. London: Heinemann.
- , 1972. *Toward a Rational Society*, trans. Jeremy J. Shapiro. London: Heinemann.
- , *Theory of Communicative Action*. Vol. 1. Boston: Beacon Press.
- Hegel, G.W.F. 1895 *Lecture on the Philosophy of Religion*, Vo. III. London: Kegan Paul.
- , 1952. *The Philosophy of Right*. Oxford: Oxford Clarendon Press.
- , 1984. *Three Essays: 1793–1795*. Notre Dam: University of Notre Dam.
- Ludden, D. 1998. *www. Sas. Upenn.edu, didownload tanggal 2 Agustus 2010*.
- Marx, Karl and Engels, 1976. *The German Ideology*. Moscow: Progress Publishers.
- McCarty, T. 1984. *The Critical Theory of Jurgen Habermas*. Polity.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. “Ilmu dan Budaya untuk Menghayati Abad Industri”, (Pidato Dies Natalis UI XXXV). Jakarta: UI Press.
- Redolf, M. 1987. *Sustainable Development, Exploring the Contradictions*. London: Routledge.
- Siebert, R. J. 1985. *The Critical Theory of Religion, the Frankfurt School; From Pragmatic to Political Theology*. New York: Monton.
- Tenbruck, F.H. 2000. “The Dream of a Secular Ecumene: the Meaning and Limits of Policies Development”, in M.

Featherstone ed. *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. London: Sage.

Tourine, A. 1984. "The Waning Sociological Image of Social Life". In *International Journal of Comparative Sociology* XXV, 12.

Tucker, R. ed. 1978. *The Marx-Engels Reader*, 2nd ed. New York: Norton

Turner, B.S. 1990. *Theories of Modernity and Postmodernity*. London: New Bury Park and New Delhi: Sage Publication.

-----2010. *Globalization East and West*. London: Sage Publication

Wallerstein, I. 1979. *Capitalist World-Economy*. New York: Cambridge University Press.

-----1988. "Should We Unthink Nineteenth Century Social Science?" *International Social Science Journal*. November, pp. 527-531.

World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. New York: Oxford University Press.

"CRITICAL AREA STUDIES"

Fadjar I. Thufail
PSDR— HT, 2010

6/2

Pre-Area Studies

- Colonial interests. Some rooted in colonial or imperial politics for the colonized areas
- Actors: missionaries and colonial officials. Ex. pre-20th C: N. Graafland, Snouck Hurgronje
- Netherlands instituted ethical policy in the early 20th C.
- In the Netherlands Indies, more schools proliferated, the need to “understand” the natives increased. Ex. Codification of “adat” into Adatrechtbundel

“Classical” Area Studies

- ◆ Post WW II. In the 1950s, several “centers for area studies” created at the universities. Funded by philanthropy (Ford, Luce) plus federal budgets
- ◆ “Southeast Asian Studies”. The context of the Cold War. The role of Vietnam war. Universities in the US: Cornell, Yale
- ◆ Japan and East Asian Studies. The context of post-Imperial Japan and Chinese communism. Works of Ruth Benedict who was also a navy officer
- ◆ Characteristics: Culture and Linguistics. Relativistic and essentialistic in terms of ethnic categories.

“Modern” Area Studies

- ◆ In the 1970s. Influence from modernist and developmentalist theories.
- ◆ Focus: Country, how a country takes part in the stages of development (dependency theory)
- ◆ Culture and Linguistic still continue, but added with applied social sciences to make a combination between cultural relativism and generalized social theorizing
- ◆ Thematic: Class. Peasant. State, in addition to the previous cultural and language themes

“Late-modern” (Critical) Area Studies

- ✦ In the late 1980s until now. Started with the crisis in cultural theory. Critique against essentialism of any kind (culture, ethnic, nationhood, etc).
- ✦ Increasing attention on the transnational connection (but not as a structurally unequal process presumed in dependency theory). Transnational connection understood as global flows of capital, people, and ideas.
- ✦ The concept of “area” undergoing redefinition. No longer rooted in essentialist term such as ethnic, country, or nation, but refers to a more fluid space such as “region” or multiple places connected through the global flows

✦ Methodological consequence:

- A “middle ground” between thick and thin description
- Multiple sites
- A different notion of comparative research (less drawn on a categorical imperative)
- Team work

Critical Area Studies in Asia

- ◊ Identifying themes emerging from global/transnational flows of capital, people, and ideas, or combination of the three
- ◊ Situating Indonesia as a node in the flows and as a comparative research site (enabling a common thread between different research teams and within a research project, but with different locations)

Thematic Concentrations (2010–2014)

1. Natural Disaster (Earthquake)

Multiple sites: China, Indonesia, US, Taiwan (proposed), Japan (proposed)

Capital: e.g. foreign donors, loan, ADB/WB/IDB role

People: e.g. international NGOs, diplomatic mission

Ideas: e.g. expert knowledge, regional database, technology transfer



2. Post-war/Post-conflict/Post-authoritarian Reconciliation –
proposed subject to available researchers

Multiple sites: Japan, Morocco, Australia, South Korea,
Indonesia

